



BALITBANG

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu



Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas Wara Nugraha-NYA Bulletin Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Edisi IV Tahun 2019 dapat tersaji di hadapan pembaca pada waktunya.

Bulletin ini memuat artikel tentang berbagai aktivitas, isu maupun analisis pandangan yang disusun oleh anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung, Tim Kelitbangan Kabupaten Badung dan Fungsional Analisis Kebijakan serta para pemangku kepentingan kelitbangan. Kami berharap tulisan-tulisan dalam Bulletin ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca sekaligus sebagai menjadi media komunikasi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dengan publik.

Kami berharap para pembaca dapat memberi masukan-masukan untuk kesempurnaan penyusunan Bulletin edisi selanjutnya

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

I Wayan Suambara, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631025 198810 1 002

DITERBITKAN OLEH :

Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

PENANGGUNG JAWAB :

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

EDITOR :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

REDAKTUR :

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
2. Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
3. Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

OFFICE :

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala”
Jalan Raya Sempidi, Mengwi - Badung
Phone (0361) 9009255
Fax (0361) 9009255
E-mail. Balitbangbadungkab@gmail.com
[web. www.balitbang.badungkab.go.id](http://www.balitbang.badungkab.go.id)
instagram : Balitbangbadung
facebook : Balitbang Kabupaten Badung

Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Badung
Mencegah Ancaman Terorisme
Untuk Mewujudkan Pariwisata Daerah
Berkelanjutan
Oleh :
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum

Fishgo : Aplikasi Android
Berbasis Navigasi Untuk Meningkatkan
Jumlah Tangkapan Ikan Dan Taraf
Hidup Nelayan Tradisional
di Kabupaten Badung

Policy Brief :
Produktivitas
Alat Tenun Kain Endek Hibah
Pemerintah Kabupaten Badung
Pada Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari
Di Desa Getasan, Kecamatan Petang
Kabupaten Badung
Oleh :
I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE

KALIEDOSKOP
3 TAHUN KEGIATAN
Badan penelitian dan pengembangan
Kabupaten badung

DAFTAR ISI:

12 Profil Dan Upaya Pemberdayaan Petani
Di Kabupaten Badung
Oleh :
I Gusti Agung Ketut Sudaratmaja

19 **Policy Brief :**
Kajian
Terhadap Efektivitas
TPST 3 R
Dalam Mengurangi Timbulan Sampah
Di Kabupaten Badung
Oleh :
Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati

31 Dokumentasi
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

"OM SWASTYASTU"



I NYOMAN GIRI PRASTA

BUPATI BADUNG



I KETUT SUIASA

WAKIL BUPATI BADUNG



KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

- Program Krama Badung Sehat (KBS)
- Ambulance Desa dan Food Security Kit
- Puskesmas UGD 24 Jam
- Jumanik di tiap banjar
- Vaksinasi Kanker Serviks
- Layanan Mobile Deteksi Dini Kanker Payudara
- Pengembangan RS Daerah Mangusada
- Biaya sekolah gratis
- PAUD Bernuansa Hindu
- Laptop SD dan SMP gratis
- Hibah Gedung Sekolah SMA
- Beasiswa luar negeri
- Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)
- Wifi gratis di setiap banjar



PANGAN, SANDANG, PAPAN

- Lahan pertanian pangan berkelanjutan
- PBB Pedesaan dan Perkotaan gratis
- Subsidi benih padi dan kedelai
- Subsidi pupuk organik dan NPK
- Pengembangan UMKM Tenun Endek Ikon Badung
- Revitalisasi pasar desa adat
- Bedah rumah dan rumah sehat
- Perbaikan rumah veteran



PPNSB

POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA
5 Prioritas Program Pembangunan



JAMINAN SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN

- Jaminan Sosial Kematian Krama Badung
- Bantuan Sosial Penunggu Pasien
- Bantuan Sosial Lanjut Usia
- Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
- Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak
- Pemagangan tenaga kerja ke Jepang
- Uji kompetensi tenaga kerja pariwisata gratis
- Pelatihan kewirausahaan



ADAT, AGAMA, BUDAYA

- Mobil operasional pecalang di tiap Desa Adat
- Hibah rehab/pembangunan balai banjar, pura, tempat ibadah
- Pemberian nafkah Sulinggih, Pemangku dan Bendesa Adat
- Hibah gamelan baleganjur kepada banjar
- Dana motivasi kreativitas Sekaa Teruna
- Revitalisasi Majelis Pertimbangan Kebudayaan (Lisibiya)



PARIWISATA

- Penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) kepada Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng
- Festival Budaya Pertanian
- Festival Bahari
- Pengembangan Desa Wisata
- Perbaikan dan penataan akses objek wisata
- Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG MENCEGAH ANCAMAN TERORISME UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA DAERAH BERKELANJUTAN



-Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum.-
Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah
Kabupaten Badung

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor andalan dari berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia dan Pemerintah Daerah di Bali, sebagai sumber devisa dari penghasilan non migas. Pariwisata diakui telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai negara melalui perluasan lapangan usaha, lapangan pekerjaan, pengembangan adat dan budaya masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah, serta mendorong pertumbuhan pembangunan daerah. Dalam hal ini, pariwisata menjadi penggerak sistem perekonomian dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara. Ada berbagai komponen yang mempengaruhi

pariwisata, seperti kehadiran wisatawan, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan objek wisata dan pelayanan/akomodasi, serta kebijakan pemerintah beserta pelaku pariwisata. Dengan luasnya cakupan pariwisata, maka kegiatan pariwisata bersifat multidimensi serta multidisiplin yang bersifat lintas sektor. Pariwisata muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang untuk memenuhi keingintahuannya tentang suatu hal yang melahirkan kepuasan bathin, sehingga melahirkan interaksi antara wisatawan dan suatu masyarakat, sesama wisatawan, serta antara pemerintah, pemerintah daerah dengan pengusaha.

Pariwisata dengan berbagai macam obyek dan daya tarik wisatanya beserta fasilitas serta

layanan pendukungnya yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, di samping membawa manfaat juga menghasilkan dampak negatif. Perkembangan pariwisata saat ini telah membawa berbagai dampak negatif, salah satunya terhadap kelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya. Oleh karena itu, paradigma pengembangan industri pariwisata di berbagai negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia, diarahkan pada pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan hidup (eco tourism). Dalam kaitan itu menarik dikaji kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghadapi ancaman terorisme untuk dapat mewujudkan pariwisata daerah yang berkelanjutan.

Terorisme menjadi isu yang utama dalam keamanan pariwisata internasional, termasuk keamanan pariwisata di Kabupaten Badung. Kejahatan ini semakin tahun semakin berkembang pesat serta keberadaan mereka semakin canggih serta terorganisir sehingga kejahatan terorisme menjadi musuh bukan saja bagi Indonesia bahkan musuh bersama dari umat manusia. Oleh karena itu, tindak kejahatan terorisme yang tidak jarang terorganisir lintas negara dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat serius dan membahayakan ideologi suatu negara serta harkat dan martabat manusia. Pada hakikatnya kejahatan terorisme memiliki tujuan tertentu dengan menciptakan kekacauan di suatu daerah sehingga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pariwisata di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Badung. Dalam kaitan itu, menjadi menarik penelitian yang berjudul "Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Mencegah Gangguan Terorisme Untuk Mewujudkan Pariwisata Daerah Berkelanjutan".

PERMASALAHAN

Kewenangan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pariwisata dapat dijumpai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada berbagai persoalan yang dapat dikaji terkait kewenangan

Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghadapi ancaman terorisme untuk dapat mewujudkan pariwisata daerah yang berkelanjutan. Beberapa persoalan yang dimaksudkan, adalah :

- Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya ?
- Upaya apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dari gangguan terorisme ?

Melalui kedua permasalahan tersebut dapat diidentifikasi batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencegah

"TERORISME MENJADI ISU YANG UTAMA DALAM KEAMANAN PARIWISATA INTERNASIONAL, TERMASUK KEAMANAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG"

ancaman terorisme yang berbahaya bagi kelangsungan pariwisata di Kabupaten Badung. Pada pihak lain, pengkajian terhadap permasalahan di atas juga dapat menunjukkan strategi yang dapat diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencegah ancaman terorisme di wilayahnya sebagai bentuk tanggung jawabnya mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang ada di Kabupaten Badung.

METODE PENULISAN

Artikel ini dapat dikualifikasikan sebagai hasil penelitian hukum normatif yang beranjak dari kekosongan norma (blank of norm) terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat maupun wilayahnya dari ancaman terorisme. Sebagai hasil penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan melalui

pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis. Sementara itu, bahan hukum sumber yang dipergunakan untuk penulisan artikel ini berasal dari peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pariwisata Dalam Membangun Kabupaten Badung

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai urusan pemerintahan daerah bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Sementara itu mengenai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar disebutkan meliputi urusan:

1. Tenaga kerja.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pangan.
4. Pertanahan.
5. Lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Perhubungan.
10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olah raga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan urusan pemerintahan pilihan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi 8 (delapan) urusan yakni urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan urusan transmigrasi. Menyimak urusan seperti di atas, maka pariwisata menjadi urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sesuai potensi daerah atau tidak bersifat wajib.

Pengembangan pariwisata dunia dan daerah Bali pada khususnya tidak terlepas dari upaya menjawab tantangan globalisasi yang ditetapkan oleh PBB dalam Sustainable Development Goals (SDGs)". Namun demikian, disadari kegiatan pariwisata dalam perkembangannya juga terus menghadapi tantangan baik bersifat internal maupun eksternal. Salah satu tantangan global yang bersifat eksternal berkaitan dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung di dalam menikmati liburannya pada suatu daerah tujuan wisata. Kenyamanan dan keamanan dalam dunia pariwisata menjadi suatu keharusan sebagai jaminan terhadap wisatawan memenuhi tujuannya berwisata. Hal ini sejalan dengan konsep berwisata sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga menjadi hak setiap orang untuk berpindah dari tempat asalnya ke tempat lain untuk mendapatkan kenikmatan jasmani dan/atau rohani dalam jangka waktu yang sementara.

Salah satu kabupaten di Provinsi Bali dengan konsentrasi produk pariwisata tertinggi di Pulau Dewata adalah Kabupaten Badung. Jumlah dan jenis produk pariwisata yang beraneka ragam telah membuat pariwisata di Kabupaten Badung berkembang pesat. Pembangunan sarana parasarana pariwisata di Kabupaten Badung juga menjadi paling maju dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Bali. Dengan demikian, Pariwisata di Kabupaten Badung saat ini telah menjadi salah satu mesin ekonomi bagi masyarakat dan penambah atau lokomotif pendapatan

daerah di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung juga saat ini menjadi satu satunya kabupaten yang Pendapatan Asli Daerah-nya paling besar di Bali karena Badung menjadi pusat pariwisata Bali yang memiliki sarana akomodasi pariwisata paling lengkap dan berkualitas dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali.

“SALAH SATU TANTANGAN GLOBAL YANG BERSIFAT EKSTERNAL BERKAITAN DENGAN JAMINAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN WISATAWAN YANG BERKUNJUNG DIDALAM MENIKMATI LIBURANNYA PADA SUATU DAERAH TUJUAN WISATA.”

Kabupaten Badung memiliki obyek dan daya tarik wisata yang beragam dan populer di luar negeri sejak lama. Obyek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisatawan di Kabupaten Badung antara lain :

1. Daya tarik wisata hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara alami, seperti Pantai Kuta, Pantai Petitenget, Pantai Legian, Pantai Canggu, Pantai Pandawa, serta Pantai Berawa.
2. Daya tarik wisata yang merupakan hasil cipta, karsa, dan rasa manusia antara lain museum sejarah, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan kompleks hiburan seperti Kuta, Legian, Garuda Wisnu Kencana (GWK),
3. Daya tarik wisata minat khusus sesuai minat wisatawannya seperti, bersepeda, mendaki gunung, menyusuri gua, tempat perbelanjaan, wisata sungai air deras, wisata bahari tempat-tempat ibadah, seperti Pura Uluwatu, Pura

Taman Ayun.

Mengenai jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan di Kabupaten Badung sampai saat ini sebanyak 36 lokasi. Sebanyak 33 daya tarik wisata telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 7 tahun 2005 dan 3 daya tarik wisata ditetapkan melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2014.

Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada umumnya dan Kabupaten Badung pada khususnya semakin meningkat pasca Bom Bali, dan bahkan melebihi target yang ditetapkan pemerintah baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Puncaknya terjadi pada tahun 2016 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dengan angka 4.356.816 orang pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 4.483.982 orang dan tahun 2016 meningkat sebesar menjadi 5.184.833 orang. Sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan karena adanya bencana erupsi Gunung Agung. Penerimaan dari sektor pariwisata menjadi sumber pendapatan utama dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Badung. Penerimaan dari sektor pajak Restoran pada tahun 2018 sebesar Rp. 624,421,524,874.54 dan dari Pajak Hotel sebesar Rp.2,236,310,473,755.09

2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam Mencegah Ancaman Terorisme

Kewenangan merupakan kekuasaan berdasarkan hukum. Pemerintah daerah agar berwenang maka kekuasaannya dalam melakukan suatu tindakan harus dilandasi oleh suatu ketentuan hukum yang jelas. Dalam kaitan itu, untuk memahami kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencegah ancaman terorisme, perlu dipahami sumber kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sementara itu terorisme secara etimologis berasal dari kata “to terror”, dalam Bahasa latin disebut “Terrere”

yang berarti gemetar atau menggetarkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata terror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman. Terror merupakan bentuk pemikiran, sedangkan terorisme adalah aksi atau tindakan teror yang terorganisir sedemikian rupa yang menimbulkan ketakutan dan kengerian pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menetapkan kejahatan terorisme sebagai “kegiatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, atau rasa takut secara meluas, yang dapat mengakibatkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Aksi terorisme juga berarti suatu serangan-serangan yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Tindak pidana terorisme merupakan fenomena sangat meresahkan masyarakat internasional termasuk Indonesia. Segala bentuk teror yang terjadi telah mengakibatkan kecemasan secara luas di masyarakat, mengganggu stabilitas nasional, munculnya kondisi saling mencurigai di masyarakat, serta dapat mengancam peradaban secara universal. Begitu besar dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terorisme sehingga semua pihak baik daerah, nasional, regional sampai internasional saling bersinergi dalam pemberantasan terorisme.

Pengeboman di Kuta merupakan awal dari aksi teroris di Bali. Setelah aksi teroris yang beruntun menghantam Bali pada Oktober 2002 serta daerah lainnya di wilayah Indonesia membuat semua aspek kehidupan terutama kegiatan pariwisata membenahi diri dari dalam, termasuk kebijakan dari pusat yang membentuk pasukan kusus anti teror

serta membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatasi aksi teror tersebut. Tindak pidana terorisme di samping sebagai bentuk radikalisme, tergolong kejahatan Extra Ordinary Crime atau termasuk dalam kejahatan yang luar biasa, serta termasuk dalam crimes against humanity atau termasuk dalam kejahatan kemanusiaan yang menjadi kejahatan yang sangat besar di mata masyarakat dunia.

Kegiatan pariwisata sangat sensitif dengan terorisme karena menyangkut kenyamanan dan keamanan wisatawan. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya Pemerintah Daerah dan lembaga terkait bersama-sama masyarakat agar destinasi wisata yang dikunjungi aman dari segala ancaman keamanan terutama ancaman terorisme. Tindak pidana teroris yang selama ini terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah terbukti sangat mempengaruhi kunjungan wisata.

Kejahatan Terorisme tidak saja menjadi ancaman untuk masyarakat dan kemanusiaan di teritori tertentu saja, tetapi juga berpengaruh di tempat-tempat yang lain yang menyangkut skala global. Ancaman teror dapat terjadi di mana saja tanpa memandang latar belakang dari negara bersangkutan. Contoh serangan yang baru terjadi beberapa bulan yang lalu adalah serangan teroris terhadap Mesjid di Christchurch di Selandia Baru. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah memberikan perhatian terhadap ekstrimis sayap kanan. Ekstrimis tidak melakukan kegiatannya sendiri namun dilakukan berdasarkan ideologi yang motivasinya telah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Sebagian besar pelaku teror adalah reaksi untuk mempertahankan ideologi yang berlebihan. Pemerintah Selandia Baru memulai menyelesaikan masalah teror di negara mereka dengan antisipasi di dalam negeri, sehingga tidak terlalu banyak ada campur tangan negara luar dalam penyelesaian masalah dalam negeri mereka. “Terorisme berdampak keras terhadap kunjungan wisatawan ke negara ini, sehingga wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah ini harus berpikir dua kali. Mayoritas wisatawan adalah dari Australia dan pelaku penembakan tersebut adalah Warga Australia”. Aksi

“TINDAK PIDANA TERORIS YANG SELAMA INI TERJADI BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI TELAH TERBUKTI SANGAT MEMPENGARUHI KUNJUNGAN WISATA.”

bom bunuh diri di Sri Lanka juga disebut sebagai aksi balasan teroris terhadap kejadian yang menimpa Selandia Baru. Aksi teroris yang menelan korban 215 orang meninggal dunia ini menjadi salah satu aksi teroris yang baru terjadi di tahun 2019. Selain berpengaruh terhadap ekonomi di negara tersebut, aksi teroris ini juga memberikan dampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan di daerah tersebut.

Menyikapi bahaya terorisme, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang tentang tindak pidana terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selanjutnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 106/PW.006/MPEK/2011 terkait pengamanan hotel sebagai bagian dari kegiatan manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi perusahaan, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan, kebijakan pengamanan, dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif.

Upaya pemerintah Daerah termasuk juga Pemerintah Kabupaten Badung untuk mencegah ancaman terorisme dapat dikualifikasikan sebagai salah satu urusannya yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini

berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang bersifat konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Daerah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kewenangan ini dijumpai dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai salah satu tugas Kepala Daerah atau Bupati/Walikota. Sementara itu, secara teknis kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Kabupaten. Dalam kaitan itu, SatPol PP Kabupaten Badung merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten Badung yang secara khusus melaksanakan tugas menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menetapkan "Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota".

Salah satu kewenangan SatPol PP berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (2) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pengamanan, penertiban. Satpol PP di dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat meminta bantuan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia bilamana tugasnya memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Pada pihak lain Satpol PP dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat melibatkan masyarakat dengan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati beserta aparat organisasi perangkat daerah terkait berkewajiban

mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya, termasuk dari ancaman terorisme.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan tindakan preventif terhadap ancaman terorisme dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk cegah dini lahir. Pada pihak lain, dengan atau tanpa dukungan dari institusi Kepolisian dan/atau TNI, Pemerintah Kabupaten Badung dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan, pengamanan, penertiban terhadap hal-hal yang dapat diduga akan melahirkan ancaman terorisme.

"PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG MELALUI BUPATI BESERTA APARAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT BERKEWAJIBAN MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI WILAYAHNYA, TERMASUK DARI ANCAMAN TERORISME.

Pemerintah Kabupaten Badung juga dapat terus mendorong penerapan sistem manajemen pengamanan hotel oleh pengelola hotel sesuai dengan dasar hukum dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 106/PW.006/MPEK/2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel. Penerapan peraturan tersebut menjadi salah satu standarisasi pengamanan terhadap objek objek vital pendukung kegiatan pariwisata. Pengamanan hotel wajib dijalankan secara profesional, berintegritas, untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat gangguan

bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman efisien dan produktif .

Pendekatan penegakan hukum partisipatif yang responsif menjadi aktual dikembangkan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencegah lahir atau terjadinya ancaman terorisme di wilayah Kabupaten Badung. Adanya informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sehubungan dengan bahaya laten terorisme dengan/tanpa mengikutsertakan pihak Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Lembaga kemasyarakatan, Forum Kerukunan Beragama, Majelis Desa Pekraman serta tokoh-tokoh masyarakat di Badung. Hal ini sejalan dengan Pasal 43B ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2018 yang menetapkan "kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan". Selanjutnya Pasal 43B ayat (4) menjelaskan kesiapsiagaan nasional yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme". Asas partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra penegak hukum terus perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga keamanan terutama keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam setiap kunjungan mereka ke destinasi pariwisata.

Secara normatif, bentuk penegakan hukum partisipatif responsif yang bersifat preventif antara Pemerintah Kabupaten Badung bersama semua pihak terkait dapat dituangkan melalui produk hukum Pemerintah Kabupaten Badung dalam bentuk Peraturan Bupati Badung. Dalam hal ini, Peraturan Bupati mengatur mengenai hak dan kewajiban antara Pemerintah Kabupaten Badung, masyarakat, dan pengusaha untuk secara bersama-sama mencegah lahir dan terjadinya ancaman terorisme.

Pengaturan hak dan kewajiban secara jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait di dalam memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan dari ancaman terorisme. Bilamana hal ini dapat diwujudkan, maka pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung akan dapat diwujudkan.

PENUTUP

Kegiatan pariwisata sangat sensitif terhadap ancaman terorisme karena menyangkut kenyamanan dan keamanan wisatawan. Tindak kejahatan terorisme merupakan kejahatan serius yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kegiatan pariwisata di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum preventif yang partisipatif responsif perlu dikembangkan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencegah lahir atau terjadinya ancaman terorisme. Pemerintah Kabupaten Badung dapat melakukan tindakan preventif melalui kerja sama dengan masyarakat untuk cegah dini lahir dan

terjadinya ancaman terorisme. Pada pihak lain, dengan atau tanpa dukungan dari institusi Kepolisian dan/atau TNI melakukan pembinaan dan penyuluhan, pengamanan, dan penertiban terhadap hal-hal yang dapat diduga akan melahirkan ancaman terorisme.

Terorisme bukan saja menjadi ancaman untuk masyarakat dan kemanusiaan di teritori tertentu, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata sehingga perlu dicegah terjadinya. Ancaman terorisme dapat mengancam kenyamanan dan keamanan hidup manusia yang sedang berwisata sehingga membutuhkan peran semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan kesadaran umat manusia untuk menghormati hak asasi manusia baik terkait dengan hak hidup dan hak berwisata. Dalam kaitan ini disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengembangkan kebijakan penegakan hukum partisipatif responsif yang bersifat preventif antara Pemerintah bersama semua pihak terkait.

“SECARA NORMATIF, BENTUK PENEGAKAN HUKUM PARTISIPATIF RESPONSIF YANG BERSIFAT PREVENTIF ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BERSAMA SEMUA PIHAK TERKAIT DAPAT DITUANGKAN MELALUI PRODUK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM BENTUK PERATURAN BUPATI BADUNG. “



PROFIL DAN UPAYA PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN BADUNG



-I Gusti Agung Ketut Sudaratmaja-

Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung
Pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

Kabupaten Badung secara garis besar memiliki tiga ekosistem dengan potensi masing-masing berbeda, yang kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan zona pembangunan. Tiga zona pembangunan tersebut adalah: (1) Badung Utara, sebagai kawasan konservasi berupa hutan dan gunung, dengan komoditas perkebunan, hortikultura dan peternakan; (2) Badung Tengah, dominan berupa sawah irigasi dan juga sentra industri kecil, dan (3) Badung Selatan, sebagai kawasan pariwisata

Ketiga kawasan tersebut memiliki hubungan fungsional secara filosofis, ekologis dan sosial ekonomi. Secara

filosofis, hutan/gunung (di utara) adalah ibu dari pertanian (di tengah), dan pertanian adalah ibu dari budaya/pariwisata (di selatan). Secara ekologis, hutan/gunung memberikan air untuk pertanian, dan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Sedangkan secara sosial ekonomi, ketiga kawasan kemudian terdiferensiasi menjadi dua kutub yaitu sektor pertanian di utara dan sektor pariwisata di selatan.

Kondisi kedua sektor ini dirasakan sangat timpang, dan sering diposisikan sebagai kesenjangan dikotomi yang memerlukan penanganan serius. Hal ini juga selalu menjadi aspirasi dan apresiasi publik, yang segera harus ditangani

DATA DAN FAKTA

Kesenjangan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, ditunjukkan oleh Data BPS Badung (2014) sebagai berikut. Rata-rata produktivitas tenaga kerja sektor pariwisata sebesar Rp 83,95 juta/tahun, jumlah ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian yang hanya mencapai Rp 39,11 juta/tahun.

Selanjutnya kalau dilihat lebih detail lagi tentang profil petani di Kabupaten Badung, ternyata datanya sangat menarik. Pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Badung tercatat sebesar Rp 55,7 juta/RT/Tahun, dan ini tertinggi di Bali yang rata-rata hanya mencapai Rp 35,6 juta/RT/Tahun. Pendapatan tersebut bila dicermati ternyata hanya 49,14% berasal dari sektor pertanian, dan sisanya 50,86% berasal dari non-pertanian (BPS Badung, 2014). Dengan demikian dapat dikatakan keberadaan petani di Badung hanya sebatas status, karena setengah lebih pendapatannya justru berasal dari sektor non-pertanian.

Namun demikian diversifikasi sumber pendapatan seperti ini justru sangat penting untuk ketahanan pangan keluarga. Seperti diketahui ketahanan pangan dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu yang berbasis produksi (base on production) dan yang berbasis ekonomi (base on economic). Selain itu hal ini juga dapat dimaknai bahwa petani di Badung sebenarnya telah mampu merebut peluang kerja di sektor lain, baik itu sektor sekunder maupun tersier, sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata.

Keuntungan lain dari diversifikasi pendapatan ini adalah kecilnya angka kemiskinan di Kabupaten Badung. Dari simulasi yang dilakukan, jika petani hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, maka dari 32.975 rumah tangga petani di Badung yang 70,96% statusnya adalah petani gurem, maka angka kemiskinan di Badung dapat mencapai 18%, tetapi kenyataannya saat ini hanya mencapai sekitar 1,98%. Data ini juga sekaligus memperkuat analisis pemerataan pendapatan, yang

menempatkan Kabupaten Badung pada posisi pendapatan tinggi dan pemerataan tinggi.

UPAYA PEMBERDAYAAN

Tujuan akhir dari setiap program pembangunan adalah bermuara pada kesejahteraan masyarakat, demikian juga halnya dengan pembangunan sektor pertanian. Fenomena dikotomi antara sektor pertanian dengan sektor pariwisata, yang sering menjadi topik kajian dan diskusi, hanya dapat dijawab dengan sinergitas. Sinergitas dalam hal ini adalah hubungan antara sektor pertanian dengan sektor pariwisata yang secara fungsional akan memberi dampak saling menguntungkan untuk keduanya. Dampak yang dimaksud adalah dampak ekonomi untuk pertanian, suplai pangan dan dampak pelestarian lingkungan



REORIENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN BADUNG, SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PETANI, ESENSINYA ADALAH MAMPU MELIBATKAN PETANI SECARA AKTIF, BAIK DI SEKTOR PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER. “

serta budaya untuk sektor pariwisata.

Memperhatikan fenomena dan data di atas, maka sudah sewajarnya dilakukan reorientasi program pembangunan sektor pertanian, yang tidak hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga harus berorientasi ekonomi atau nilai tambah. Reorientasi program pembangunan tersebut juga harus diikuti dengan penguatan sumberdaya manusia (capacity building). Kabupaten Badung dalam rentang 10 tahun terakhir sebenarnya sudah mulai melakukan reorientasi tersebut, di antaranya

1. Penguatan basis produksi, seperti perbaikan infrastruktur, bantuan

permodalan, bantuan sarana produksi, subsidi pupuk, keringanan pajak, jaminan pemasaran, dan asuransi pertanian.

2. Penguatan ekonomi petani, melalui program pengolahan hasil, pengembangan produk-produk specialty seperti kopi dan sayuran, pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi (cash crop) seperti asparagus, pertanian hemat lahan seperti irigasi tetes, hidroponik dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta pameran dan promosi.
 3. Rintisan pengembangan sentra produk pertanian, seperti pembuatan green house untuk komoditas sayuran, kandang koloni untuk ayam petelur dengan skala yang relatif besar
 4. Penguatan sinergi pertanian-pariwisata, melalui Festival Budaya Pertanian, program desa wisata, ekowisata dan agrowisata.
 5. Rintisan program Agro Techno Park (ATP), merupakan program prestisius Pemkab Badung yang kini sedang pada tahap perencanaan. Nantinya ATP akan menjadi center of excellence dan sekaligus show room produk pertanian Badung, dan juga akan menjadi model nyata sinergi pertanian-pariwisata.
 6. Penguatan sumberdaya manusia pertanian, yang saat ini telah dirintis melalui program petani milenial, dengan melibatkan petani muda (taruna tani) yang melek teknologi digital. Hal ini dimungkinkan dan dapat diperkuat dengan adanya sentra produksi yang telah dibangun (green house dan kandang ayam petelur), terpasangnya jaringan internet sampai ke tingkat banjar, adanya Badung Command Center dan peluang pasar di sektor pariwisata di Badung selatan
- Kelemahan mendasar petani saat ini termasuk petani di Badung adalah hanya berada dan berkutat pada sektor primer, sehingga keuntungan yang diraih tidak memadai. Sementara pelaku di sektor sekunder dan tersier dengan

keuntungan relatif lebih besar dilakukan dan diraih oleh orang lain.

Reorientasi program pembangunan pertanian di Kabupaten Badung, sebagai upaya pemberdayaan petani, esensinya adalah mampu melibatkan petani secara aktif, baik di sektor primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian, petani dapat menikmati margin keuntungan yang lebih besar. Desa Wisata dengan berbagai aktivitasnya yang melibatkan petani secara aktif, demikian juga ATP adalah contoh nyata dari esensi pemberdayaan ekonomi petani.

PENUTUP

Fakta tentang pendapatan petani di Badung yang ternyata lebih dominan bersumber dari sektor non-pertanian, membawa posisi mereka pada kondisi paradoks. Di satu sisi terkesan pekerjaan petani yang mereka tekuni hanya sekedar status, namun di sisi lain sebenarnya mereka dianggap telah mampu memanfaatkan peluang kerja di sektor non-pertanian, sebagai akibat pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata. Hal ini ternyata juga berdampak terhadap kecilnya angka kemiskinan di Kabupaten Badung.

Reorientasi program pembangunan pertanian di Kabupaten Badung, selain tetap berbasis produksi (base on production), karena memiliki dimensi sebagai penghasil pangan, pelestarian lingkungan dan budaya, tetapi juga harus diperkuat dengan program yang berorientasi ekonomi (base on economic). Termasuk di dalamnya penguatan sumberdaya manusia petani di bidang informasi teknologi. Dengan demikian, memanfaatkan peluang pertumbuhan sektor pariwisata adalah menjadi suatu keharusan.

Berbagai program sudah dan akan dirintis di Kabupaten Badung dengan dimensi sinergitas pertanian-pariwisata, saat ini sedang dipacu. Keduanya diharapkan akan mendapatkan nilai tambah, yaitu nilai tambah ekonomi untuk pertanian serta suplai pangan, pelestarian lingkungan dan budaya untuk keberlanjutan sektor pariwisata. Pemberdayaan ekonomi petani akan nyata adanya, apabila dalam suatu program petani aktif dan terlibat langsung, sehingga mampu menikmati margin keuntungan dari sektor primer, sekunder dan tersier.

MINI NEWS



FishGO

FISH GO berhasil lolos menjadi TOP 45

Inovasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Kompetisi ini sekaligus untuk menjangkau Inovasi pelayanan publik yang akan mewakili Indonesia di forum internasional.

Inovasi yang diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung kini menjadi salah satu Duta Indonesia dalam ajang United Nations Public Service Award (UNPSA) Tahun 2020



BALITBANG KABUPATEN BADUNG



Hasil olahan
data satelit



Integrasi dengan
aplikasi android



Waktu
penangkapan
yang tepat



Efisiensi
waktu dan
BBM



Peta wilayah
potensi
penangkapan ikan



Rute
terbaik untuk
menangkap ikan



Peningkatan
hasil
tangkapan



BALITBANGBADUNGKAB

@BALITBANGBADUNG

FISHGO : APLIKASI ANDROID

BERBASIS NAVIGASI UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH TANGKAPAN IKAN DAN TARAF HIDUP NELAYAN TRADISIONAL DI KABUPATEN BADUNG



Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan perairan terbuka memberi keuntungan kepada masyarakat Badung baik secara fisik maupun ekonomi. Secara fisik Kabupaten Badung memiliki potensi laut dengan panjang garis pantai 81,3 km, lebar sempadan 100 m, dan luas sempadan 480 m². Laut dan pantai di Badung menjadi pusat aktivitas ekonomi baik perikanan maupun pariwisata Kabupaten Badung.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Badung, dari potensi perikanan mencapai 44,9 ton yang dimiliki Kabupaten Badung, namun baru 6 ton atau 13 % saja yang termanfaatkan. Selain masalah tersebut, jumlah nelayan di Kabupaten Badung juga terus mengalami penurunan dari 1610 orang di Tahun 2008 menjadi 1281 orang pada Tahun 2017. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Badung adalah nelayan tradisional yang melaut maksimal sejauh 20 mil dengan perahu mesin 15 GT. Nelayan juga memiliki permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan tentang teknologi, metode penangkapan dan permodalan.

Untuk menanggapi kondisi serta permasalahan nelayan tradisional yang rentan dengan kemiskinan maka Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung pada tahun 2017 melaksanakan Festival Inovasi yang memunculkan Aplikasi FishGo. Aplikasi ini dikembangkan oleh I Gede Merta Yoga Pratama, I Nyoman Januarta Triska Putra, I Wayan Matsya Deva Nagendra, I Kadek Dwi Artama, Anak Agung Gde Agung Aditya Pratama dan Donna Priskila Bonggalola. yang saat itu adalah mahasiswa Fakultas Kelautan Dan Perikanan Universitas Udayana Aplikasi android ini berguna untuk mengetahui daerah potensial penangkapan ikan untuk meningkatkan jumlah tangkapan dan taraf hidup nelayan tradisional di wilayah perairan Kabupaten Badung.

Aplikasi FishGo memanfaatkan data penginderaan jauh dan pemodelan oseanografi. Data penginderaan jauh yang digunakan adalah citra MODIS dari Ocean Colour National Aeronautics and Space Administration (NASA). Citra tersebut

kemudian diolah dan keluaran yang diperoleh adalah koordinat daerah potensial penangkapan ikan. FishGo menjadi satu-satunya aplikasi di Indonesia yang mampu memprediksi lokasi potensial penangkapan ikan hingga ke tingkat spesies dalam suatu perairan khusus daerah. FishGo sudah dapat diunduh di Playstore dan saat ini masih dalam versi beta.

“FISHGO MENJADI SATU-SATUNYA APLIKASI DI INDONESIA YANG MAMPU MEMPREDIKSI LOKASI POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN HINGGA KE TINGKAT SPESIES DALAM SUATU PERAIRAN KHUSUS DAERAH.”

FishGo telah diimplementasikan kepada 11 kelompok nelayan di Kedonganan, Kabupaten Badung. Melalui aplikasi FishGo nelayan akan memperoleh informasi terkait waktu penangkapan terbaik, lokasi potensial penangkapan ikan sesuai dengan jenis spesies dan rute penangkapan terbaik. Sebelum menggunakan aplikasi FishGo nelayan masih melaut menggunakan metode tradisional seperti memperhitungkan Sasih (bulan dalam istilah Bali), posisi bintang dan pergerakan burung. Dengan metode tradisional tersebut nelayan tidak memperoleh jaminan akan memperoleh ikan sesuai dengan jenis yang dipilih dilokasi yang dituju. Waktu yang dibutuhkan sekali melaut untuk menangkap ikan berlangsung selama 16 jam dimulai dari pukul 16.00 Wita sampai pukul 08.00 Wita keesokan harinya dengan menghabiskan biaya mencapai Rp.200.000 untuk bahan bakar.

Setelah memanfaatkan aplikasi FishGo, waktu penangkapan ikan menjadi lebih singkat dari 16 jam

menjadi 8 jam yang dibagi menjadi 2 sesi yaitu sesi pagi selama 4 jam mulai pukul 04.00 Wita sampai 08.00 Wita dan sesi sore mulai pukul 16.00 Wita sampai 20.00 Wita setiap harinya. Dari segi waktu aplikasi FishGo memberikan dampak bagi keluarga nelayan untuk dapat berkumpul lebih lama. Biaya bahan bakar bisa menjadi lebih efisien yaitu antara Rp.70.000 sampai Rp.140.000 untuk sekali melaut. Dengan telah ditentukannya lokasi potensial penangkapan ikan yang sudah pasti nelayan bisa memperoleh rata-rata penangkapan 100 kilogram dengan pendapatan bersih mencapai Rp.300.000/nelayan setiap kali melaut. Melalui aplikasi FishGo nelayan Badung mulai mengubah metode penangkapan ikan menjadi lebih modern dengan rutinitas meminta update lokasi pada aplikasi FishGo setiap harinya kepada pengelola aplikasi.

Dengan diimplementasikannya FishGo diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencapai beberapa tujuan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) meliputi antara lain Tanpa Kemiskinan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Ekosistem Laut dan; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di sektor perikanan khususnya nelayan tradisional di Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan aplikasi FishGo dengan didukung oleh regulasi yaitu perda tentang Bendega yang sedang dalam proses legislasi dan merekrut pendiri aplikasi FishGo sebagai pegawai kontrak/ tenaga teknis developer FishGo pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung serta menyediakan perangkat komputer dan ruangan khusus untuk dapat melakukan update peta lokasi potensial penangkapan ikan setiap harinya sehingga para nelayan dapat memanfaatkan aplikasi FishGo

dengan semakin baik.

Aplikasi FishGo memiliki peluang sangat besar untuk direplikasi di daerah lain di Indonesia. Ketersediaan data penginderaan jauh di seluruh wilayah perairan Indonesia menjadi pendukung untuk replikasi tersebut. Platform aplikasi yang telah tersedia di Playstore juga memberikan kesempatan kepada nelayan di setiap daerah yang telah terdaftar sebelumnya untuk dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis. Selain itu, setiap daerah di Indonesia yang memiliki masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan tradisional sehingga aplikasi FishGo dapat diimplementasikan pada daerah tersebut. Untuk memaksimalkan kerja aplikasi maka diperlukan sampling kualitas perairan di daerah terkait untuk mengetahui potensi perikanan di daerah tersebut. Selanjutnya yang diperlukan adalah uji coba aplikasi di daerah baru yang ingin mengimplementasikan FishGo.

“FISHGO DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM MENCAPAI BEBERAPA TUJUAN PEMBANGUNAN GLOBAL YANG TERCANTUM DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)”



BALITBANG KABUPATEN BADUNG



#FITUR APLIKASI FISHGO

WAKTU PENANGKAPAN YANG TEPAT 🕒



- Aplikasi **FishGo** mampu menentukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Proses penangkapan ikan menjadi lebih singkat dari 16 jam menjadi 8 jam yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi yang dimulai pada pukul 04.00 Wita - 08.00 Wita dan sesi sore pukul 16.00 Wita - 20.00 Wita setiap harinya.

PETA WILAYAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN 📍



- Aplikasi ini mampu menampilkan informasi area potensial untuk penangkapan ikan hingga ke tingkat spesies. Dengan **FishGo**, nelayan dapat mengetahui lokasi 3 jenis ikan komoditas utama tangkapan nelayan di wilayah perairan Kab. Badung yaitu tongkol, kenyar, dan lemuru.

RUTE TERBAIK UNTUK MENANGKAP IKAN 🗺️



- **FishGo** memiliki fitur rute terbaik menuju lokasi potensial penangkapan ikan. Dengan adanya fitur ini, bahan bakar minyak menjadi lebih efisien. Selain dapat mengarahkan nelayan ke lokasi potensial penangkapan ikan, aplikasi ini juga mencegah para nelayan untuk menangkap ikan di daerah perairan yang dilindungi.



BALITBANGBADUNGKAB

@BALITBANGBADUNG

BALITBANG KABUPATEN BADUNG

MENERIMA PENGHARGAAN TOP 99 KOMPETISI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, SH.,MM menerima penghargaan Top 99 Kompetisi Pelayanan Publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Drs. Syafruddin, M.Si bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, SH di Semarang Tanggal 18 Juli 2019. Inovasi yang ditampilkan adalah FishGo, yaitu aplikasi android berbasis navigasi untuk meningkatkan jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional di Kabupaten Badung yang dinamakan FishGo.



Lokasi TPST di Desa Pecatu kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung



-Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati-
Analisis Kebijakan Ahli Muda
pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

POLICY BRIEF : KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS **TPST 3 R** DALAM MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat serta aktivitas industri telah berimplikasi terhadap peningkatan sampah yang harus dikelola, baik terhadap bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Daya beli masyarakat yang semakin meningkat berimplikasi pula pada meningkatnya gaya konsumerisme di wilayah perkotaan yang akhirnya berakibat pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga dapat mengurangi timbunan sampah.

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Badung masih mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung sebagai tempat pembuangan sampah yang dihasilkan

oleh masyarakat. Di samping itu Kabupaten Badung sampai saat ini telah mempunyai 22 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengolah sampah baik organik maupun anorganik serta diharapkan dapat berfungsi secara efektif dengan menerapkan inovasi berbasis teknologi pengolahan yang lebih baik serta memperhatikan sarana prasarana pendukungnya sehingga dapat mengurangi timbunan sampah serta mengurangi pembuangan sampah ke TPA Suwung.

PENDAHULUAN

Sebuah kota yang padat penduduk selalu dihadapkan pada permasalahan sampah, di antaranya volume sampah yang melebihi kapasitas daya tampung, manajemen pengelolaan sampah yang tidak efektif, hingga kurangnya dukungan dari pemerintah. Penumpukan sampah tersebut akan berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan estetika (Samadikum, dkk 2016).

Kemajuan industri pariwisata telah membuat Kabupaten Badung mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang pesat. Perkembangan sosial ekonomi tersebut berimplikasi terhadap terjadinya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Badung karena migrasi penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat akibat pendapatan per kapita yang juga meningkat, termasuk meningkatnya intensitas aktivitas pada industri pariwisata maupun industri yang terkait. Perkembangan tersebut menimbulkan dampak ikutan lainnya berupa peningkatan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Badung. Selain volume, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan juga semakin beragam.

Sampah selanjutnya menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Badung karena peningkatan volume sampah belum dapat diimbangi oleh kemampuan dalam mengelolanya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Badung. Permasalahan sampah hingga saat ini juga masih menjadi salah satu isu pembangunan dari tingkat global, nasional hingga lokal. Terobosan-terobosan diperlukan agar pengelolaan sampah dapat menjadi sendiri efektif dari sisi pembiayaan, namun juga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku dan mind set masyarakat tentang sampah.

Penanganan timbulan sampah bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah semata, akan tetapi membutuhkan pula partisipasi masyarakat dan seluruh pihak yang menjadi produsen sampah. Partisipasi mutlak diperlukan karena laju

produksi sampah telah melampaui kapasitas penanganannya. Tanpa langkah penanganan yang tuntas, kehidupan masyarakat dan industri pariwisata Kabupaten Badung akan mengalami bencana akibat sampah. Hal tersebut tentu menuntut Pemerintah Kabupaten Badung untuk segera melaksanakan kebijakan yang komprehensif, agar secara signifikan akan dapat mengurangi timbulan sampah.

“PERMASALAHAN SAMPAH HINGGA SAAT INI JUGA MASIH MENJADI SALAH SATU ISU PEMBANGUNAN DARI TINGKAT GLOBAL, NASIONAL HINGGA LOKAL”

Pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu hingga hilir menuntut manajemen yang terpadu sejak pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, hingga pembuangan. Setiap tahapan kegiatan tersebut berkaitan antara satu sama lainnya dan memiliki hubungan timbal-balik dan dalam proses itulah pendekatan Reduce, Reuse hingga Recycle (3R) telah dilaksanakan sehingga sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanyalah yang telah berwujud residu dan tidak dimanfaatkan lagi. Sebagai bagian dalam upaya penanganan timbulan sampah baik organik maupun anorganik, saat ini Kabupaten Badung sudah memiliki 22 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

(TPST) 3R yang tersebar di enam kecamatan, dengan tujuan mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA Suwung.

DESKRIPSI MASALAH

Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kemudian diikuti dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus menerus akan membuat masyarakat menghadapi masalah degradasi lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik di wilayah perkotaan adalah pengelolaan sampah. Volume sampah yang meningkat dengan laju pertumbuhan eksponensial akan memunculkan berbagai permasalahan kebutuhan lahan pembuangan sampah, serta semakin tingginya biaya pengelolaan sampah dan biaya-biaya lingkungan (Aji, 2008).

Produksi timbulan sampah di Kabupaten Badung setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh sebab itu pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara tertib, disiplin, efektif dan efisien. Pembangunan TPST 3R bertujuan untuk mengurangi permasalahan timbulan sampah, karena sampah yang dihasilkan dikelola terlebih dahulu sebelum residunya yang tidak bisa dimanfaatkan lagi dibuang pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Data jumlah timbulan sampah dan penanganan sampah di TPST 3R pada Tahun 2018 seperti disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk * (jiwa)	Berat Sampah ** (kg/bulan)	Timbulan Sampah (kg/bulan)	Jumlah TPST
1	Kuta Selatan	164.780	0,37	1.829.058	4
2	Kuta	107.660	0,37	1.195.026	1
3	Kuta Utara	134.730	0,37	1.495.503	3
4	Mengwi	131.930	0,37	1.464.423	8
5	Abiansemal	92.040	0,37	1.021.644	4
6	Petang	25.760	0,37	285.936	2
	Total	656.900		7.291.590	22

SUMBER = BADUNG DALAM ANGKA 2018 dan DLHK Kab. Badung

Tabel 2
Timbulan dan Penanganan Sampah Yang Diolah TPST 3R di Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah	Jumlah TPST 3R	Rata-rata timbulan sampah/ bulan (kg)	%
1.	Kuta Selatan	164.780	1.829.058	4	254.057	13,98
2.	Kuta	107.660	1.195.026	1	88.168	7,38
3.	Kuta Utara	134.730	1.495.503	3	215.866	14,43
4.	Mengwi	131.930	1.464.423	8	297.702	20,33
5.	Abiansemal	92.040	1.021.644	4	63.485	6,21
6.	Petang	25.760	285.936	2	6.196	2,17
7.	Total	656.900	7.291.590	22	925.474	

SUMBER = Badung Dalam Angka 2018 dan Dinas LHK Kab. Badung (data diolah).

Data menunjukkan bahwa sebanyak 22 unit TPST 3R yang ada di seluruh kecamatan saat ini belum dapat berfungsi secara efektif dalam mengurangi timbulan sampah, karena terdapat ketimpangan yang sangat tinggi antara timbulan sampah yang dihasilkan dan kemampuan TPST 3R untuk mengurangnya. Kondisi timbulan sampah di Kabupaten Badung pada Tahun 2018 timbulan sampah yang dapat dikelola oleh TPST rata-rata berkisar hanya 2,17% - 20,33% sedangkan produksi sampah setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

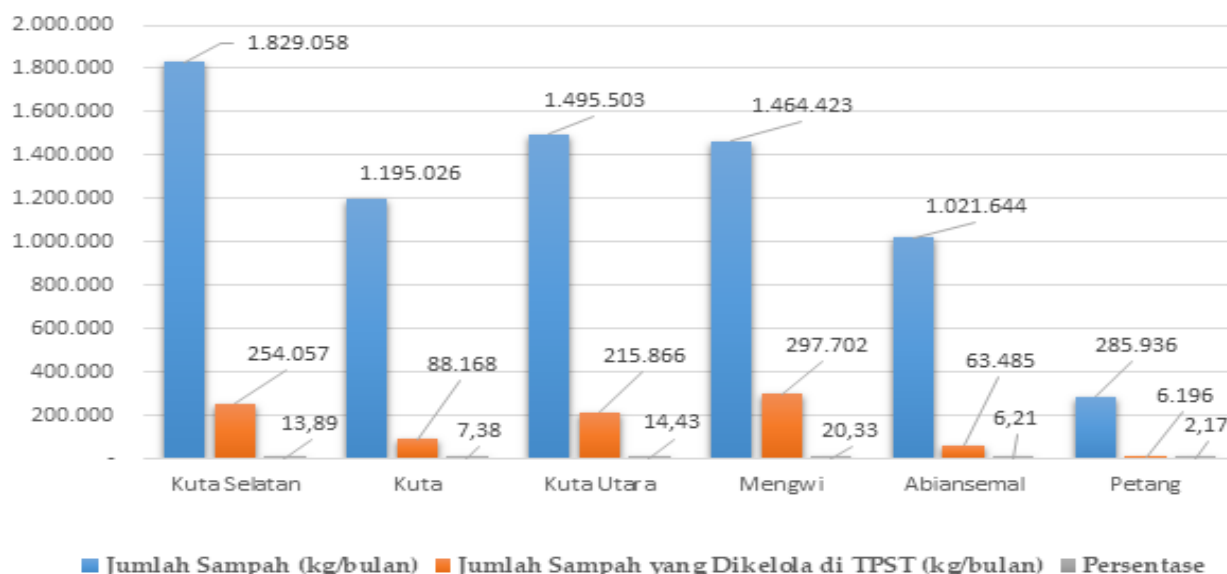
Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan pengertian TPST di desanya masing-masing sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakatnya untuk melakukan pemilahan dari sumbernya terutama yang berasal dari aktivitas rumah tangga masih tercampur antara sampah organik (dedaunan dan sisa makanan) dan anorganik. Begitu juga dengan sampah yang berasal dari aktivitas tempat usaha juga belum terpisah jenis sampahnya. Sementara sampah yang bersumber dari aktivitas hotel sudah terpisah antara sampah organik dan anorganik sedangkan sampah organik yang bersumber dari aktivitas hotel sudah terbagi menjadi sampah dedaunan dan sampah sisa makanan.

Sampah yang tidak terpilah menyebabkan sulitnya pemilahan sampah di TPST yang terkadang menyebabkan penumpukan sampah atau residu di sekitar TPST yang menjadi pemicu tidak sehatnya

lingkungan sekitar TPST. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya penolakan masyarakat akan keberadaan TPST terutama masyarakat di lingkungan TPST itu.

Seiring dengan penambahan penduduk yang berimplikasi dengan jumlah timbulan sampah oleh sebab itu diharapkan agar pengelolaan sampah di TPST juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun, berdasarkan pengamatan empiris terlihat bahwa antara produksi sampah dan kemampuan untuk mengelola sampah tersebut tidak seimbang (Grafik 1).

Grafik 1
Timbulan Sampah dibandingkan dengan Sampah Yang Dikelola di TPST 3R Tahun 2018 di Kabupaten Badung



Secara umum pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta apabila tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan serta pariwisata. Hal tersebut akan menjadi masalah jangka pendek dan jangka panjang sehingga perlu disentuh dengan kebijakan pemerintah daerah dengan demikian maka penanganannya akan lebih terintegrasi dengan hasil maksimal.

REKOMENDASI

Dalam usaha mengefektifkan TPST 3R guna mengurangi timbulan sampah disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- Agar TPST 3R dapat meningkatkan efektivitasnya dalam pengelolaan sampah, maka sampah harus dipilah sejak dari sumbernya.** Setiap rumah tangga, perusahaan, kantor, industri harus melakukan pemilahan sampah sebelum sampah diangkut oleh petugas sampah.
- Manajemen pengelolaan sampah harus dilakukan dengan tata kelola yang berjenjang dari skala kabupaten, kecamatan, desa, banjar hingga rumah tangga.** Setiap warga/rumah tangga, perusahaan/kantor, industri harus berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya melalui pemilahan sampah dan pembayaran retribusi sampah, yang akan digunakan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah maupun operasional TPST 3R di masing-masing wilayah.
- Melakukan pemetaan kebutuhan TPST 3R di setiap wilayah disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.** Idealnya setiap desa terdapat 1 unit TPST 3R sehingga dapat mengurangi timbulan sampah secara signifikan yang tentunya harus didukung dengan regulasi. Untuk desa-desa yang terkendala lahan dapat melakukan kerja sama antar desa dalam penanganan sampah.
- Melakukan pendampingan dalam manajemen pengolahan sampah secara berkelanjutan serta mengoptimalkan manajemen TPST 3 R melalui :**
 - Peningkatan kualitas SDM dan kompetensi pengelola.
 - Sarana prasarana yang digunakan harus memenuhi standar.
 - Penerapan teknologi yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi polusi (pencemaran).
 - Pengelolaan yang berorientasi bisnis sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis.
- Perlu dilakukan langkah-langkah tegas, penegakan sanksi hukum atas pelanggaran pengelolaan sampah.**



POLICY BRIEF :
Produktivitas
Alat Tenun Kain Endek Hibah
Pemerintah Kabupaten Badung
Pada Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari
Di Desa Getasan, Kecamatan Petang Kabupaten Badung



-I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati,SE-
 Analis Kebijakan Ahli Pertama
 pada Badan Penelitian dan Pengembangan
 Kabupaten Badung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan dan perkuatan UMKM sebagai salah satu cara untuk membangun ekonomi kerakyatan. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. Di samping melaksanakan kegiatan melalui dinas teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal ini Bupati Badung juga memberikan hibah uang dan barang kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berminat berusaha namun memiliki keterbatasan modal dan sarana. Salah satu kelompok yang mendapatkan hibah barang Alat Tenun Bukan Mesin dari Bupati Badung adalah Kelompok Fortuna Sari di Desa Getasan Kecamatan Petang dengan unit usaha yang dikembangkan adalah produksi kain endek.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi rakyat, pemerintah Kabupaten Badung tidak saja mengandalkan dampak dari investasi yang berskala

besar, akan tetapi juga melakukan langkah-langkah membangun dan memperkuat UMKM yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat di pedesaan. Berbagai program dan kegiatan dilakukan oleh instansi teknis untuk menggugah minat masyarakat berwira usaha baik yang bersifat perorangan maupun berkelompok. Langkah itu dilakukan karena pemerintah Kabupaten Badung sangat menyadari bahwa Badung merupakan daerah tujuan kunjungan wisatawan manca negara dan domestik, sangat memerlukan beraneka ragam kebutuhan mulai dari obyek wisata, kuliner, maupun souvenir yang bernuansa lokal Bali. Salah satu produk yang dapat dijadikan souvenir bahkan sekaligus juga merupakan kebutuhan masyarakat Badung dan Bali adalah kain tenun endek khas Bali.

Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Badung mendukung penuh keinginan dan permintaan masyarakat yang bergabung dalam kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari di Desa Getasan, Kecamatan Petang yang berniat mengembangkan produksi kain endek khas Badung. Bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan menghibahkan sebanyak 30 unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) kepada Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari yang anggotanya berjumlah 30 orang pada tahun 2016. Disamping hibah barang ATBM, juga dilakukan pelatihan kepada anggota kelompok tersebut yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui APBD termasuk pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan selama pelatihan.

DESKRIPSI MASALAH

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan: Sejauhmana hibah barang ATBM tersebut bermanfaat bagi kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari dalam hubungan produktivitasnya sebagai pengrajin penghasil kain tenun endek di Kabupaten Badung ?

Pelaksanaan Program Bantuan Hibah alat kerja berupa Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dapat dilihat dari 3 pendekatan yaitu :

1. Dilihat dari sudut pandang filosofis, program ini berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, sekaligus merupakan pencerminan dari nilai sila ke 5 dari Pancasila dan tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Dari sudut sosiologis, warga masyarakat Desa Getasan sangat merasakan manfaat program ini, sehingga menambah minat masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang lainnya. Disamping itu, program ini juga mendapat dukungan DPRD Kabupaten Badung, terbukti dari disetujuinya anggaran kegiatan ini dalam APBD Kabupaten Badung.
3. Secara yuridis, program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 tentang

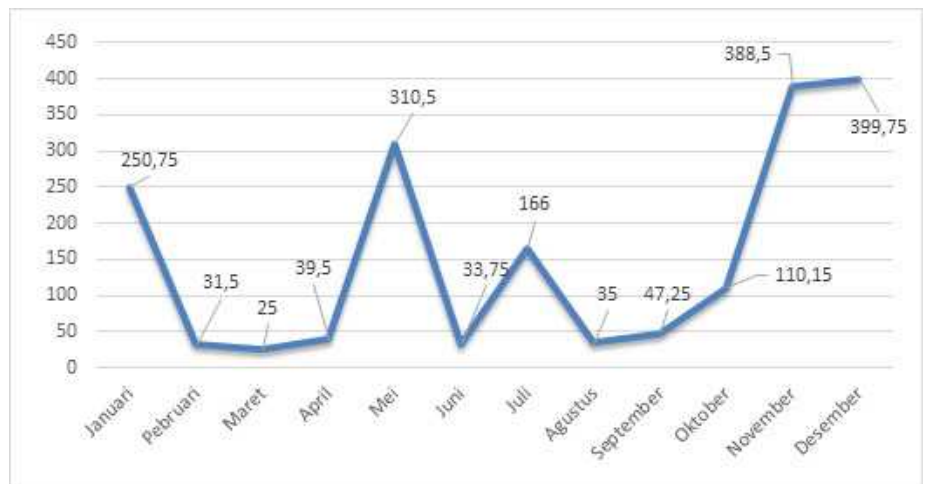
Bantuan Hibah alat kerja kepada Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari Desa Getasan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar mengingat dana yang dipergunakan bersumber dari APBD Kabupaten Badung.

Pada Tahun 2016 melalui APBD Perubahan Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung menghibahkan sebanyak 30 unit ATBM kepada kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari dan sekaligus pula menganggarkan pelaksanaan pelatihan bagi 30 orang pengrajin lengkap dengan bahan pelatihan. Pelatihan dilaksanakan selama 14 hari (tanggal 1 s.d 14 Desember 2016) di bawah koordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Badung. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah anggota yang aktif menjadi 20 orang dan tahun 2018 sampai saat ini masih tersisa sebanyak 10 orang sebagai pengrajin aktif. Berkurangnya jumlah pengrajin yang aktif berakibat pada berkurangnya jumlah produksi kain dan banyak alat-alat tenun yang tidak terpakai dan tidak terawat.

Dengan adanya penurunan jumlah tenaga kerja pada tahun 2018 tersebut maka berkorelasi dengan menurunnya hasil produksi. Berdasarkan laporan hasil produksi dari Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari dapat dilihat bahwa perkembangan hasil produksi kain tenun dari Kelompok Tenun Fortuna Sari dapat dilihat pada gambar grafik 1 dibawah ini.

Grafik 1
Hasil Produksi Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari
Desa Getasan Tahun 2018



Sumber : Laporan Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari Tahun 2018 (diolah)

Keterangan: Rata-rata per-bulan : 153 meter (10 perajin). Data tahun 2017 tidak tersedia

Dari grafik di atas terlihat bahwa produksi terendah pada bulan Maret 2018 sebesar 25 meter dan tertinggi pada bulan Desember 2018 sebesar 399,75 meter dengan rata rata produksi sebesar 153 meter/bulan.

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh di lapangan, 1 orang pengrajin yang sudah terampil dapat menghasilkan kain endek sepanjang 2,25 meter perhari/8 jam kerja. Namun mengingat pengrajin ini masih pemula maka panjang kain yang dihasilkan hanya rata-rata 1,5 meter/orang/hari. Dari 30 orang pengrajin pemula, maka kain yang dihasilkan adalah 45 meter/hari (1.350 meter/bulan), adapun harga jual kain endek per meter sebesar Rp. 120.000 maka hasil penjualan yang didapatkan sebesar Rp.162.000.000,00/bulan dan memerlukan biaya produksi (biaya bahan baku, upah tenaga kerja dan biaya operasional) sebesar Rp.138.600.000,00/bulan sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 23.400.000,00/bulan. Tetapi kondisi di lapangan sampai tahun 2018 alat yang berfungsi hanya sebanyak 10 alat dengan produksi rata – rata 153 meter/bulan, adapun harga jual kain endek per meter adalah Rp.120.000,00 maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.18.360.000,00/bulan dan biaya produksi yang diperlukan sebesar Rp.15.708.000,00/bulan sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.652.000,00/bulan. Analisa produksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I
Perkembangan Hasil Produksi Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari
Desa Getasan Tahun 2018

Uraian	S D M	ALAT	Hasil Produksi	Hasil Produksi	Harga Jual	Biaya Produksi	Hsl. Penjualan	Untung/Rugi
	orang	unit	mtr/hr	mtr/bln	Rp.	Rp. / bln	Rp. / bln	Rp.
Kondisi Aktual 2018	10	10	0,51	153	120.000	15.708.000	18.360.000	2.652.000
Kondisi yang diharapkan	30	30	1,5	1350	120.000	138.600.000	162.000.000	23.400.000

Sumber : Laporan Kelompok Tenun Ikat Fortuna Sari Tahun 2018 (diolah)

Keterangan: Kondisi diharapkan adalah bila 30 unit ATBM digunakan efektif oleh 30 orang perajin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Produktivitas berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu daya produksi.

Dengan kondisi sebagaimana yang diuraikan di atas, tentu bila dilihat dari aspek bisnis perkembangan usaha ini menjadi tidak menguntungkan. Penjelasan yang diperoleh dari pengurus dan anggota kelompok tenun ikat Fortuna Sari, bahwa prospek pasar kain endek ini pada dasarnya sangat tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya konsumen yang berminat melakukan pemesanan seperti kantor-kantor pemerintah di Kabupaten Badung, sekolah, kelompok masyarakat (PKK, sekeha) namun pesanan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kurangnya pengrajin dan penggunaan alat tenun belum optimal. Menyusutnya atau

menurunnya jumlah pengrajin disebabkan karena pekerjaan menenun hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan saja walaupun upah kerja yang dibayarkan cukup tinggi yaitu Rp. 40.000/meter. Apabila ada pekerjaan yang bisa memberikan pendapatan lebih besar walaupun hanya beberapa hari saja, pengrajin tersebut memilih tidak memproduksi dan lebih memilih pekerjaan yang sifatnya beberapa saat tersebut, misalnya panen padi di sawah, bertukang/buruh dan beternak ayam. Sebagai perbandingan, upah kerja pengrajin tenun kain endek di kabupaten Gianyar sebesar Rp.15.000/meter.

REKOMENDASI

Pengembangan UMKM endek merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi

serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung, khususnya sub bidang sandang. Oleh sebab itu, sekalipun pemberian hibah ATBM kepada kelompok perajin Fortuna Sari hingga saat ini masih belum produktif, Pemerintah Kabupaten Badung harus tetap berkomitmen untuk mengembangkan usaha kerajinan kain endek.

Dalam kasus Kelompok Perajin Fortuna Sari udapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Melakukan perekrutan perajin baru secara terbuka bagi masyarakat yang berminat menjadi perajin sejati agar seluruh alat yang ada dapat digunakan untuk menghasilkan kain endek yang berkualitas. Dalam

proses tersebut dinas teknis secara lintas sektoral perlu melakukan pendampingan secara berkelanjutan, bermitra kerja dengan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Udayana. Pusat Inkubator Bisnis Universitas Udayana perlu segera melakukan penjajagan dengan dinas teknis serta membantu menyusun Strategic Plan agar upaya pengembangan usaha kelompok tenun ikat Fortuna Sari menjadi lebih terstruktur dan sistematis.

2. **Sebagian ATBM yang tidak dimanfaatkan dapat dialihkan kepada kelompok lain yang membutuhkan dan telah menunjukkan kinerja yang baik.** Apabila setelah tahapan pendampingan dan evaluasi menunjukkan bahwa kelompok tersebut tidak pula menunjukkan komitmen, keseriusan dan kemajuan yang signifikan.
3. **Pengembangan pilot project pada beberapa lokasi potensial lainnya yang dilakukan secara selektif** serta memperoleh pendampingan sejak fase yang mendasar hingga terwujudnya pemasaran. Untuk percepatan pengembangan perajin kain tenun endek di Kabupaten Badung.
4. **Memfasilitasi inovasi desain** agar perajin dapat menghasilkan endek berdesain khas Badung yang menjadi tenun ikon Badung.
5. **Perlu membangun sinergi antara APBD Kabupaten, APB Desa, lembaga keuangan/ perbankan yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan produktivitas.** Dalam upaya perkuatan permodalan

- kelompok perajin,
6. **Mempromosikan produk tenun Badung di berbagai event baik lokal, nasional maupun internasional.** Untuk itu diperlukan pula intervensi dari Pemerintah Kabupaten Badung yang bertujuan membantu penyerapan hasil produksi tenun ikat UMKM, misalnya dengan membuat peraturan tertulis tentang penggunaan pakaian dinas dari bahan endek bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, melaksanakan festival/lomba yang mewajibkan pemakaian kain endek khas produksi perajin Kabupaten Badung, menggunakan tenun endek khas Badung sebagai suvenir/cinderamata tamu-tamu daerah Kabupaten Badung.



INOVASI DESA PUNGGUL:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS SDM GENERASI MILENIAL



Pelatihan masyarakat desa di Bidang Teknologi Informasi pada Desa Punggul, Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung



-KADEK SUKARMA,S.KOM-
Perbekel Desa Punggul
Kabupaten Badung

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah memasukkan gerakan Fourth Industrial Revolution atau Revolusi Industri 4.0 ke dalam agenda nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Revolusi Industri 4.0 adalah suatu gerakan percepatan untuk mendukung proyeksi dari IMF (International Monetary Fund) yang menyatakan Indonesia

masuk sebagai peringkat 6 dari 10 negara dengan ekonomi terbaik di dunia pada tahun 2023. Penerapan Revolusi Industri 4.0 akan meningkatkan sektor industri Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal akan menghasilkan model bisnis baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah salah satu dari Sepuluh Prioritas Nasional dalam Inisiatif “Making Indonesia 4.0” sebagai upaya untuk mempercepat perkembangan industri di Indonesia. Untuk mendukung Revolusi Industri 4.0 Indonesia berencana merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts dan Mathematics), perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa mendatang seperti yang tertulis dalam roadmap “Making Indonesia 4.0” yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selain perubahan kurikulum, salah satu strategi lainnya adalah untuk mendorong angkatan kerja di Indonesia untuk mendapatkan pelatihan dan meningkatkan keterampilannya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Peraturan terkait angkatan kerja diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 4 huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang

terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.”

Guna mencapai angkatan kerja yang kompeten, diperlukan kolaborasi dari beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, pelaku industri hingga unsur akademisi. Insitusi pemerintahan khususnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Latihan Kerja (BLK) telah menyediakan prasarana dan sarana sebagai tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau keahlian di bidangnya masing-masing. Para peserta BLK saat ini diberi pelatihan dengan kompetensi untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan kualifikasi pekerjaan yang berubah cepat. Selain pelatihan seputar teknologi, peserta BLK juga diberikan pengetahuan tentang manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar perilaku organisasi serta hubungan industrial. Upaya BLK dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah kurangnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Hal ini dikarenakan mayoritas lulusan SMA lebih memilih melanjutkan pendidikan diploma atau sarjana. Selain itu, pemilihan lokasi BLK yang terletak di pusat kota sehingga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Namun di Kabupaten Badung, tepatnya di Desa Punggul yang

terletak di Kecamatan Abiansemai telah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan masyarakat desa, khususnya di bidang teknologi informasi. Pelatihan masyarakat yang dipelopori oleh Perbekel Desa Punggul, Kadek Sukarma, S. Kom. dilatarbelakangi oleh masalah pengangguran dan kemiskinan di desa tersebut. Faktor lain yang mendasari program pelatihan ini adalah masyarakat desa yang tidak mampu mengikuti kemajuan teknologi dan tingginya angka PHK akibat keterampilan SDM tidak memenuhi kriteria. Program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja dengan keahlian yang didapat selama mengikuti pelatihan.

Program pelatihan ini melibatkan masyarakat desa yang belum bekerja dan memiliki kemauan untuk meningkatkan kualitas diri. Masyarakat desa sebelumnya akan diseleksi terlebih dahulu, persyaratan utamanya adalah telah tamat belajar SMA/SMK dan memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Dalam satu sesi pelatihan dibatasi hanya 10 peserta, para peserta ini nantinya wajib menandatangani pakta integritas dimana selama masa pelatihan berlangsung masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut harus rutin hadir selama masa kontrak berlangsung, apabila ada peserta yang melanggar akan dikenakan sanksi. Masa pelatihan berlangsung selama 1 tahun yang dimulai dengan 6 sampai 8 bulan pelatihan teori dan praktikum dalam bidang teknologi informasi lalu dilanjutkan dengan magang di perusahaan swasta.

Dukungan dari pihak Pemerintah Desa Punggul agar

**“PROGRAM PELATIHAN
INI JUGA DAPAT
MENGUBAH PANDANGAN
MASYARAKAT DESA
TENTANG KEMAJUAN
TEKNOLOGI DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0.”**

program pelatihan pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan efektif adalah dengan menyediakan beberapa fasilitas di antaranya 1 laboratorium komputer yang telah dilengkapi dengan 10 unit komputer, 3 unit proyektor dan beberapa alat multimedia lain. Fasilitas-fasilitas tersebut khusus digunakan untuk program pelatihan, agar peserta dapat langsung melakukan praktik mengenai materi yang telah disampaikan oleh pengajar. Materi atau keterampilan khusus yang difokuskan dalam pelatihan adalah mengenai perakitan komputer dan instalasi jaringan. Untuk tenaga pengajar sendiri berasal dari beberapa institusi pendidikan, seperti Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, Guru SMA Negeri 1 Abiansemai dan Guru SMA Negeri 2 Petang. Selain dukungan dari sisi infrastruktur, Pemerintah Desa Punggul juga memberikan sertifikat kepada peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan, dilanjutkan dengan mempekerjakan para peserta dengan perusahaan yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama terkait tenaga kerja dengan Pemerintah Desa Punggul maupun mempekerjakan para lulusan pelatihan yang memiliki kemampuan yang sesuai di Pemerintah Desa Punggul sendiri.

Melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat-manfaat positif terutama pada hal-hal yang terkait dengan dunia kerja seperti meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi serta dapat membuka peluang bisnis dalam bidang informasi dan teknologi. Dengan

demikian masyarakat desa dapat berkompetisi pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu pasar global. Selain itu, **program pelatihan ini juga dapat mengubah pandangan masyarakat desa tentang kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0.** Dengan adanya perubahan pandangan tersebut, masyarakat dapat menyesuaikan diri sehingga mampu bersaing di dunia kerja yang saat ini sangat erat kaitannya dengan teknologi. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang terlibat baik itu masyarakat desa maupun pemerintah.

Selain memberikan manfaat positif bagi masyarakat Desa Punggul sendiri, diharapkan program pemberdayaan masyarakat ini juga dapat memacu desa-desa lain untuk

membentuk program serupa yang nantinya dapat memberikan nilai tambah pada masyarakat desa khususnya di bidang teknologi guna mempersiapkan diri menghadapi Revolusi Industri 4.0.



SISTEM ANDROID DESA PUNGGUL

GALERY KEGIATAN

PELATIHAN TEKNOLOGI INFOMASI
DI DESA PUNGGUL



KEGIATAN BALITBANG TAHUN 2017

FORUM KELITBANGAN TAHUN 2017



Bupati Badung membuka Forum Kelitbangan Kabupaten Badung disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Badung, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Wakil Bupati Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

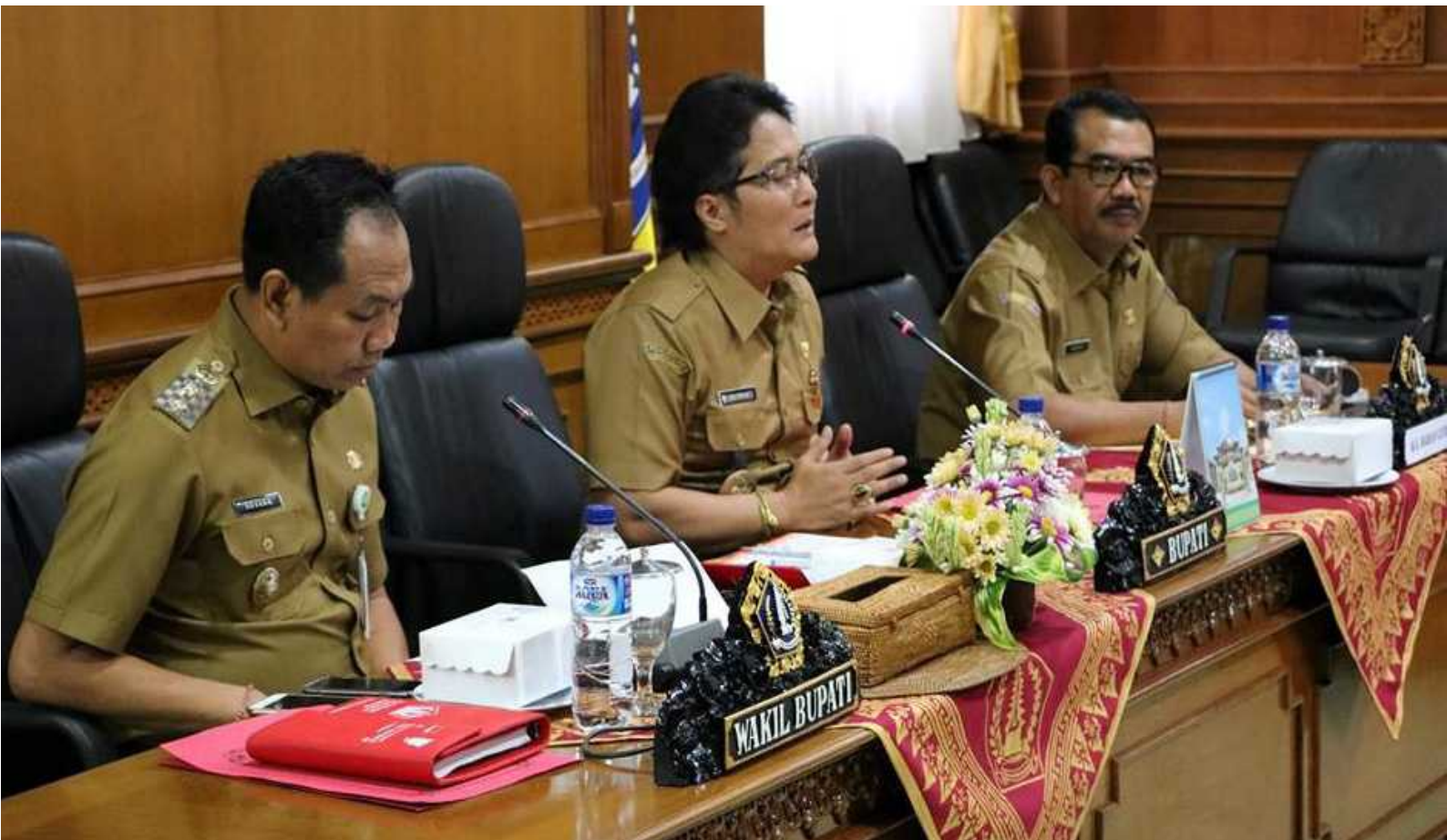
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah, dibentuklah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung. Sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di

bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung bahwa salah satu tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di Pemerintah Kabupaten Badung.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Badung perlu dilaksanakan suatu Forum Kelitbangan

sebagai media komunikasi antar lembaga penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kinerja, mutu hasil dan penentuan isu strategis sehingga tercipta suatu sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan lembaga litbang lainnya (Perguruan tinggi, LSM, Instansi Vertikal dan swasta/ BUMN/BUMD) yang dikoordinir oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Forum ini diharapkan dapat menjadi media strategis dalam membangun jejaring kelitbangan dalam mengawal akselerasi implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPNSB) di Kabupaten Badung.

RAPAT KOORDINASI MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, S.SOS memimpin rapat koordinasi Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung didampingi Wakil Bupati Badung dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang kadangkala tidak sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian ini antara lain disebabkan produk kebijakan publik yang diterapkan belum berlandaskan pada hasil-hasil kajian akademik atau penelitian. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan peran litbang agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan mengakomodir permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan akademis.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka pencapaian sasaran otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki dimensi tugas yang luas, sehingga output yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh beragam pengguna. Dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik, lembaga penelitian dan pengembangan berperan untuk melakukan kegiatan-

kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan, yang oleh jajaran pimpinan pemerintahan daerah akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan.

Dalam mencapai pelaksanaan kelitbangan yang optimal, telah dibentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai

dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 3588 / 03 / HK / 2017 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung yang akan melaksanakan tugas-tugas kelitbangan secara komprehensif, sehingga nantinya akan menghasilkan berbagai keluaran kelitbangan yang berkualitas.

Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung terdiri

dari Ketua : Bupati Badung, Wakil Ketua : Wakil Bupati Badung dan Sekretaris Daerah, Sekretaris : Kepala Balitbang, Anggota : Kepala Bappeda, Para Asisten Setda, Prof.Dr.Dr. Ketut Suastika,Sp. Pd.Kemd, Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, Ms., Mm. Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si. Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E., M.M., Ak.,Cpa. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng Dan Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH.

Majelis Pertimbangan yang terdiri dari akademi para akademisi diharapkan turut memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun Badung yang berorientasi kepada pertumbuhan serta pemerataan pembangunan baik antar wilayah maupun antar sektor sebagai implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

PELAKSANAAN KEGIATAN INNOVATION FESTIVAL (INOFEST) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SH Beserta Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, SH., MM. pada pelaksanaan lomba Inofest tahun 2017

Otonomi daerah harus dipahami sebagai peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memberdayakan secara optimal potensi-potensi yang ada di daerah, termasuk potensi RIPTEKS (Riset, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni). Sesuai dengan visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung,

maka perlu diupayakan langkah-langkah strategis melalui potensi RIPTEKS yang dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Fakta empiris menunjukkan bahwa budaya kreatif inovatif menjadi salah satu perkembangan suatu daerah yang tidak selalu ditentukan

oleh kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas kreativitas dan inovasi generasi muda dalam mengembangkan daerahnya. Generasi muda merupakan bibit unggul bangsa yang diharapkan dapat dan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui inovasi-inovasi

sains dan teknologi.

Beranjak dari hal di atas, untuk memacu pencapaian hasil kreativitas dan inovasi yang perlu dilakukan maka diperlukan suatu wahana untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan potensi sumber daya terdidik, yang ditandai munculnya berbagai produk unggulan yang mampu mengangkat harkat martabat masyarakat di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Balitbang Kabupaten Badung memberi ruang berkreasi dan berinovasi yang diwadahi dalam sebuah kegiatan “Innovation Festival (INOFEST) Tahun 2017” yang nantinya diharapkan kegiatan ini mampu menjadi akselerator transfer gagasan - gagasan kreatif dan inovatif ke dalam implementasinya di masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung mengapresiasi pelaksanaan Innovation Festival yang diprakarsai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Dikatakannya iptek memiliki nilai-nilai strategis dan urgensi dalam membangun peradaban dan kesejahteraan bangsa. Pengalaman dari

bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa iptek dapat menjadi tulang punggung dalam membangun peradaban, oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam bidang iptek. Rangkaian kegiatan innovation festival (inofest) ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan rasa bangga atas karya inovasi kreatif di bidang iptek.

Tantangan lain dalam bidang penelitian dan inovasi adalah belum adanya konsep intermediasi antara peneliti dan pembuat kebijakan di bidang lain untuk menghasilkan infrastruktur iptek yang memadai bagi pengembangan inovasi teknologi. Kekurangan infrastruktur akibat lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat dan terbatasnya sumber daya iptek serta rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, merupakan faktor-faktor yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Inofest merupakan prakarsa Balitbang Kabupaten Badung dan baru pertama kali dilaksanakan sejak terbentuknya Balitbang Kabupaten

Badung.

Adapun jumlah peserta yang mendaftar sejumlah 40 kelompok, terdiri dari tingkat SMP 7 kelompok, tingkat SMA 14 kelompok dan tingkat Perguruan Tinggi 19 kelompok. Namun yang lolos seleksi berdasarkan hasil penilaian oleh tim juri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Provinsi Bali serta Universitas Udayana ke tahap presentasi sejumlah 23 kelompok, terdiri dari tingkat SMP 3 kelompok, tingkat SMA 10 kelompok dan tingkat Perguruan Tinggi 10 kelompok yang nantinya akan menghasilkan 3 peringkat di masing – masing kategori. Ternyata banyak inovasi baru yang muncul dari siswa dan mahasiswa dan perlu didalami lebih lanjut untuk bisa diimplementasikan baik yang di bidang IT maupun bidang lainnya, sedangkan Silpakara Nugraha adalah penghargaan kepada mereka yang berinovasi dan telah terbukti hasilnya yang dilakukan oleh kelompok2 masyarakat terutama yang aplikatif dalam kehidupan sehari hari dan bernilai ekonomis.



Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Suiasa, SH menyerahkan penghargaan kepada Pemenang Inovation Festival Tahun 2017

KEGIATAN BALITBANG TAHUN 2018

FORUM KELITBANGAN TAHUN 2018



Menteri Agama Republik Indonesia membuka Forum Kelitbang Kabupaten Badung Tahun 2018 disaksikan Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung, Penasehat FKUB Kabupaten Badung, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI

Pada tahun 2018 ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung telah melaksanakan 20 Kegiatan Kelitbang, diluar kegiatan insidental yang ditugaskan oleh pimpinan. Dari sejumlah kegiatan tersebut, maka ada isu strategis yang diangkat adalah : "Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kabupaten Badung". Pemilihan isu strategis tersebut didasarkan atas pertimbangan adanya indikasi munculnya gerakan radikalisme, ancaman terorisme, perlunya perkuatan rasa nasionalisme sebagai implementasi pengamalan nilai nilai pancasila, heteroginitas penduduk Kabupaten Badung, dan diperlukannya suasana yang kondusif bagi Badung sebagai daerah tujuan pariwisata. Atas dasar pertimbangan itu pula, Bapak Bupati menugaskan Badan Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Badung untuk melakukan survey kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung. Selanjutnya dalam rangka menjamin validitas hasil survey dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, maka dalam pelaksanaannya Balitbang Kabupaten Badung bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI, yang mulai dari tanggal : 19 Februari 2018 dan seluruh rangkaianannya berakhir pada Bulan Agustus Tahun 2018. Selain melakukan survey kerukunan umat beragama, tahun ini juga dilakukan pengukuran tingkat kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung, karena tingkat kebahagiaan masyarakat mempunyai konektivitas dengan kerukunan hidup.

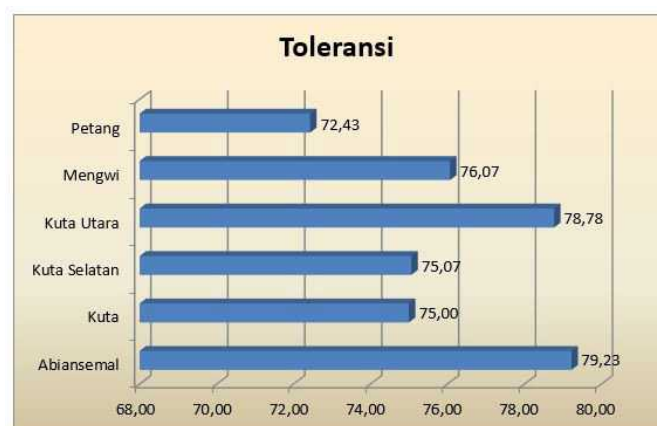
Dari beberapa konsepsi kerukunan, ditarik beberapa rumusan, yaitu: 1) Kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama, yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing, 2) Dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama yang lain, dengan kata lain setara dalam menjalankan agamanya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama. 3) Bekerjasama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan

bersama bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah: “suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan berbagai rumusan dan kesimpulan diatas, maka untuk memperoleh Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Survei ini mengukur tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Sementara, hipotesis penelitian ini adalah kerukunan terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 62 Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung, maka di dapat hasil Analisis Kategori untuk dimensi Toleransi (Y1) dari seluruh responden yang berjumlah 992 umat beragama sebagai berikut:

Toleransi	f	%
Sangat Tinggi	225	22,68
Tinggi	758	76,41
Sedang	9	0,91
Remdah	0	0,00
Sangat Rendah	0	0,00
Total	992	100,00

Hasil analisis masing-masing dimensi menunjukkan bahwa sebagian besar dari total responden merupakan umat beragama yang memiliki tingkat toleransi berada pada kategori Tinggi. Data menunjukkan sebanyak 758 responden (76,41%) memiliki skor sikap dimensi Toleransi yang berada pada kategori TINGGI. Bahkan 225 responden (22,68%) lain memiliki skor skor sikap dimensi Toleransi yang berada pada kategori SANGAT TINGGI. Untuk mengetahui gambaran skor dimensi Toleransi (Y1) masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada grafik berikut:



Hasil Analisis Kategori untuk dimensi Kesetaraan (Y2) dari seluruh responden yang berjumlah 992 umat beragama di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Kesetaraan	f	%
Sangat Tinggi	303	30,54
Tinggi	688	69,35
Sedang	1	0,10
Remdah	0	0,00
Sangat Rendah	0	0,00
Total	992	100,00

Tabel di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap dimensi Kesetaraan (Y2) yang dirasakan oleh responden selaku umat beragama di Kabupaten Badung yang berjumlah menunjukkan bahwa sebagian besar dari total responden merupakan umat beragama yang memiliki tingkat Kesetaraan (Y2) berada pada kategori Tinggi, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 688 responden (69,35%) memiliki skor sikap dimensi Kesetaraan (Y2) yang berada pada kategori TINGGI. Bahkan 303 responden (30,54%) lain memiliki skor skor sikap dimensi Kesetaraan (Y2) yang berada pada kategori SANGAT TINGGI. Untuk mengetahui gambaran skor dimensi Kesetaraan (Y2) di masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada grafik berikut



: Diketahui berdasarkan perhitungan terhadap penelitian di 62 Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung, maka di dapatkan hasil Analisis Kategori untuk dimensi Kerjasama (Y3) dari seluruh responden yang berjumlah 992 umat beragama sebagai berikut:

Kerjasama	f	%
Sangat Tinggi	182	18,35
Tinggi	803	80,95
Sedang	7	0,71
Remdah	0	0,00
Sangat Rendah	0	0,00
Total	992	100,00

Tabel di atas adalah hasil analisa deskriptif terhadap dimensi Kerjasama (Y3) yang dirasakan oleh responden selaku umat beragama di Kabupaten Badung. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 803 responden (80,95%) memiliki skor sikap dimensi Kerjasama (Y3) yang berada pada kategori TINGGI. Bahkan 182 responden (18,35%) lain memiliki skor sikap dimensi Kerjasama (Y3) yang berada pada kategori SANGAT TINGGI. Untuk mengetahui gambaran skor dimensi Kerjasama (Y3) di masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada grafik berikut:



Diketahui dalam penelitian ini, Kerukunan Umat Beragama (Y) diukur berdasarkan 3 dimensi pengukuran, yaitu dimensi Toleransi (Y1), Kesetaraan (Y2), dan Kerjasama (Y3) dimana hasil pengukuran ketiga dimensi tersebut dianalisa kembali untuk mengetahui nilai tingkat Kerukunan Umat Beragama (Y) di Kabupaten Badung. Adapun hasil analisis kategori Kerukunan Umat Beragama (Y) adalah sebagai berikut:

KUB 2018	f	%
Sangat Tinggi	282	28,43
Tinggi	710	71,57
Sedang	0	0,00
Remdah	0	0,00
Sangat Rendah	0	0,00
Total	992	100,00

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total responden memiliki tingkat Kerukunan Umat Beragama (Y) yang berada pada kategori Tinggi, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 710 responden (71,57%) memiliki skor sikap variabel Kerukunan Umat Beragama (Y) yang berada pada kategori TINGGI. Bahkan 282 responden (28,43%) lain memiliki skor sikap variabel Kerukunan Umat Beragama (Y) yang berada pada kategori SANGAT TINGGI.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap variabel Kerukunan Umat Beragama (Y) bagi umat beragama pada 62 desa/kelurahan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 992 orang, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total variabel tersebut f

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
KUB Badung 2018	78,00	5,90	78,0	Signifikan	60,00
			78,5	Tidak Signifikan	Tingkat Kerukunan Umat Beragama Baik

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total variabel Kerukunan Umat Beragama secara signifikan berada di angka 78,0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi umat beragama pada 62 desa/kelurahan di Kabupaten Badung memiliki sikap Kerukunan Umat Beragama yang termasuk ke dalam kategori Baik ($> 60,00$). Dengan kata lain, umat beragama pada 62 desa/kelurahan di Kabupaten Badung memiliki cerminan sikap-sikap toleransi beragama yang sepenuhnya sesuai dengan kepatutan interaksi yang seharusnya dimiliki oleh setiap umat beragama, atau dapat dikatakan telah mengimplementasi undang-undang yang berkaitan dengan kerukunan beragama, sehingga sikap Kerukunan Umat Beragama mereka hampir mencapai skor maksimal.

Dapat diketahui bahwa sikap Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung hampir mencapai skor maksimal. Akan tetapi, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh indikator, yang tentunya dengan mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator. Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari indikator yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator kesetaraan dan kerjasama, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas variabel Kerukunan Umat Beragama umat beragama di Kabupaten Badung, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari variabel kesetaraan dan kerjasama.

KEGIATAN KAJIAN AGRO TECHNO PARK DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG



Wakil Bupati Badung didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung memimpin Rapat Kajian Agro Techno Park Di Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Penataan Wilayah Kabupaten Badung Utara terutama di Kecamatan Petang diarahkan pengembangannya dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi. Dalam pengembangannya, kawasan ini diarahkan sebagai kawasan (1) melindungi dan melestarikan Kawasan Hutan Lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang; (2) mengembangkan hutan rakyat sebagai Kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup; (3) mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan tangkapan air hujan dan Kawasan Resapan Air; (4) mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi Sistem Agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian; (5) mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana

dan prasarana yang memadai; dan (6) mengembangkan KDTWKp dan DTW berbasis Agrowisata dan Ekowisata (Perda No. 26 Tahun 2013).

Untuk meningkatkan pembangunan daerah Badung Utara yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka perlu dilakukan upaya pengembangan dan peningkatan aktivitas pertanian dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan perekonomian dengan kawasan Badung Selatan yang focus pada pengembangan kepariwisataan. Pengembangan Kecamatan Petang sebagai kawasan Badung Utara lebih diarahkan pada upaya menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada melalui pengembangan ekonomi lokal dengan dikaitkan pada upaya pemenuhan kebutuhan aktivitas kepariwisataan di Badung Selatan terutama terkait dengan kebutuhan produk-produk pertanian. Dalam hal ini, pengembangan ekonomi lokal

diarahkan pada proses kerjasama yang erat antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat local itu sendiri (Blakely, 1994).

Kecamatan Petang merupakan kawasan yang berada di Badung Utara dimana kecamatan ini memiliki komoditi pertanian yang sangat potensial. Beberapa komoditi pertanian yang dapat dijadikan komoditas unggulan adalah jeruk, kopi, maupun asparagus dengan berbagai hortikultura dan berbagai jenis bunga. Hasil panen komoditi pertanian lebih dominan diperdagangkan dalam bentuk segar dan belum diupayakan pengemasan dan produksi pasca panen secara optimal. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya pengembangan terpadu kawasan pertanian yang terdiri dari aktivitas

produksi, pengembangan pengemasan dan penciptaan atau produksi bahan olahan dari hasil pertanian. Dalam kawasan tersebut juga diperlukan aktivitas pendidikan dan pelatihan bagi petani dan juga usaha pemasaran. Dalam hal ini terintegrasinya aktivitas pertanian tersebut diupayakan dapat memberikan pendapatan pada masyarakat lokal setempat. Selain itu aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir ini juga dapat ditingkatkan optimalisasinya dengan memadukan dengan aktivitas kepariwisataan, baik itu wisata alam maupun wisata pendidikan pertanian sehingga upaya peningkatan taraf hidup petani dengan tetap menjaga kawasan sebagai kawasan pertanian dan konservasi tetap dapat terjaga. Model pengembangan kawasan terintegrasi ini dapat berupa agro techno park atau taman teknologi pertanian yang telah dikembangkan di beberapa kawasan di Indonesia.

Pengembangan kawasan taman teknologi pertanian (agro techno park) ini akan lebih cepat terwujud apabila ada dokumen perencanaan dan program yang jelas arahnya dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat. Kegiatan ini merupakan sebuah proses studi dalam upaya memberikan panduan dalam perencanaan dan perancangan kawasan pertanian terintegrasi berupa taman teknologi pertanian (agro techno park) dimana aktivitas produksi, pengemasan dan pemasaran hasil pertanian, pendidikan dan rekreasi terintegrasi dalam suatu wadah dengan mengoptimalkan potensi kawasan yang telah ada menuju pertumbuhan dan perkembangan kawasan yang berorientasi kepada community base development dan sustainable development. Dalam kajian ini akan terungkap dan diungkapkan produk unggulan dan potensial di kawasan, bagaimana peran masyarakat, pemerintah dan swasta dalam

pengelolaan serta aktivitas dan fasilitas apa saja yang dapat ditampung untuk dapat mengoptimalkan potensi kawasan dan mengembangkan ekonomi lokal. Untuk mendukung pengembangan kawasan, selain potensi yang ada, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat diperlukan sehingga pengembangan kawasan bias lebih optimal.

Agro techno park yang akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan upaya Pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kompetensi serta menggairahkan minat berwirausaha para petani sekitar lokasi proyek. Itu sebabnya pada tahap awal pendirian agro techno park di Kecamatan Petang, Pemerintah Daerah berencana tidak meraup keuntungan (profit). Setelah 10 tahun berdirinya agro techno park dan jiwa kewirausahaan petani mulai terbangun, maka Pemerintah Kabupaten Badung baru berorientasi pada profit dalam hal pengelolaan ATP.

KEGIATAN KAJIAN PENENTUAN AREA PENANGKAPAN IKAN MELALUI APLIKASI FISH-GO DI PERAIRAN KABUPATEN BADUNG



Kajian Penentuan Area Penangkapan Ikan Melalui Aplikasi Fish-GO Di Perairan Kabupaten Badung

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di daerah Provinsi Bali yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan perairan terbuka memberi keuntungan kepada masyarakat Badung baik secara fisik maupun ekonomi. Secara fisik Kabupaten Badung memiliki potensi laut dengan panjang garis pantai 81,3 km, lebar sempadan 100 m, dan luas sempadan 480 m² (Bapedal Provinsi Bali, 2010). Laut dan pantai di Badung menjadi pusat aktivitas ekonomi baik perikanan maupun pariwisata. Masyarakat di kawasan pesisir sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dimana jumlah nelayan di Kabupaten Badung pada tahun 2015 mencapai 1400 (PPS Kabupaten Badung, 2016). Jumlah produksi ikan pada tahun 2015 mencapai 6,159.90 ton dimana jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (4,748.40 ton pada tahun 2013 dan 6,094.90 ton tahun 2014) (BPS Badung, 2016). Potensi perikanan terbesar di Kabupaten Badung terdapat di wilayah Kedongan yang telah ditetapkan sebagai salah satu sentra usaha perikanan dan kelautan terbesar di Bali. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah lokasi penangkapan setiap saat. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang identik dengan kemiskinan (Sebenan, 2007). Sebagian besar nelayan yang tergolong miskin adalah nelayan tradisional dengan permasalahan seperti kurangnya pengetahuan tentang teknologi, metode penangkapan, dan pemodalan (DKP, 2007). Permasalahan utama nelayan tradisional adalah kesulitan mengetahui lokasi daerah potensi tangkapan ikan akibat kurangnya pemahaman tentang teknologi, penggunaan alat tangkap, dan masalah pemodalan. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Badung.

Penelitian untuk menghasilkan Peta Prakiraan Daerah Potensial Penangkapan Ikan (PPDPI) telah banyak dilakukan salah satunya peta PPDPI dari Balai Penelitian dan Observasi laut (BPOL) yang berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Akan tetapi nelayan sebagai pelaku utama yang melakukan penangkapan ikan tidak mendapat informasi mengenai daerah potensial tangkapan tersebut akibat kurangnya media informasi. Perkembangan teknologi khususnya Android Smartphone yang pesat di Indonesia, melahirkan ide untuk menciptakan sebuah aplikasi berbasis Android yang mampu menampilkan PPDPI dari BPOL tersebut untuk para

nelayan maupun masyarakat yang ingin menangkap ikan. Aplikasi ini diberi nama Fish-GO, dengan konsep aplikasi yang sederhana sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan. Peta PPDPI selanjutnya disimpan dalam server sebagai sumber data. Melalui aplikasi ini, nelayan dapat memperoleh informasi dengan mudah mengenai lokasi daerah potensial tangkapan ikan sehingga diharapkan jumlah tangkapan ikan akan meningkat, biaya untuk melaut dapat berkurang dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Kabupaten Badung.



KEGIATAN MANGUPURA AWARD TAHUN 2018



Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menyelenggarakan kegiatan Mangupura Award yang merupakan penganugerahan dan apresiasi atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Badung dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional di tahun 2017 serta masyarakat Kabupaten Badung yang berjasa ataupun berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan, pendidikan, olahraga, lingkungan hidup dan kebudayaan.

Penganugerahan Mangupura Award melalui proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Dokumen Mangupura Award serta penilaian dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Juri penilaian Mangupura Award pada katagori Perangkat

Daerah, katagori Perusahaan Daerah serta katagori Pemerintah Desa selain hal tersebut diatas penganugerahan Mangupura Award juga diberikan kepada perseorangan masyarakat Kabupaten Badung dalam semua strata yang memperoleh pengakuan atas jasanya sebagai penggagas ataupun pelestari serta masyarakat Kabupaten Badung yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional, dimana pada katagori pengakuan ini proses seleksi dilakukan oleh Perangkat Daerah pengusul sesuai bidangnya masing-masing.

Pelaksanaan penilaian Mangupura Award pada katagori Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah serta Pemerintah Desa diawali dengan pengumpulan dokumen mulai tanggal 9 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 .

dengan rincian sebagai berikut :

- Katagori perangkat daerah
- Katagori perusahaan daerah

- Katagori Pemerintah desa
- Katagori Penerima Pengakuan

Terhadap dokumen yang sudah diterima di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung maka Tim Verifikasi Dokumen Mangupura Award yang ditetapkan dengan SK Bupati Badung Nomor 7677/03/HK/2017 tanggal 29 Desember 2018 ini mulai melakukan verifikasi dokumen dari tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018.

Penilaian dan verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Juri Penilaian Mangupura Award setelah Tim Verifikasi Dokumen Mangupura Award selesai melakukan verifikasi dokumen Mangupura Award. Tim Juri Penilaian Mangupura Award tersebut ditetapkan dengan SK. Bupati Badung Nomor 7660/03/HK/2017 tanggal 29 Desember 2017.

KEGIATAN BALITBANG TAHUN 2019

FORUM KELITBANGAN TAHUN 2019



Forum Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung secara resmi dibuka oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Prof. H. Mohamad Nasir, Drs., Ak., M.Si., Ph.D,

Pelaksanaan Forum Kelitbangan Kali Ini Adalah Merupakan Pelaksanaan Yang Ketiga, Sejak Terbentuknya Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Badung Akhir Tahun 2016 Yang Lalu. Forum Kelitbangan Merupakan Wahana Bagi Badan Penelitian Dan Pengembangan Untuk Melaksanakan Fungsi Kelitbangan, Yang Didalamnya Meliputi Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian Dan Evaluasi Kebijakan.

Pada Tahun 2019 Ini Badan Penelitian Dan Pengembangan Akan Melaksanakan 13 Kegiatan Kelitbangan, Diluar Kegiatan Insidentil Yang Ditugaskan Oleh Pimpinan. Dari Sejumlah Kegiatan Tersebut, Maka Isu Strategis Yang Kami Angkat Adalah "Peran Strategis Lembaga Litbang Daerah Dan Asn Dalam Era Industrialisasi

4.0". Pemilihan Isu Strategis Tersebut Didasarkan Atas Pertimbangan Adanya Bahwa Kehidupan Kita Saat Ini Telah Diwarnai Oleh Suatu Perubahan Yang Amat Dramatis, Dipicu Oleh Revolusi Teknologi Yang Berbasis Digital. Era Ini Dikenal Dengan Sebutan Era Industri 4.0. Dimana Pesatnya Kemajuan Teknologi Memungkinkan Terjadinya Otomatisasi Hampir Di Segala Bidang, Bahkan Pengaplikasiannya Dapat Berupa Robot Yang Mampu Menggantikan Tenaga Manusia Sehingga Lebih Efektif dan Efisien. Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Posisi, Tantangan dan Peran Strategis Riset dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Indonesia Dihadapkan Dengan Tantangan Untuk Mempersiapkan dan Melengkapi Sdm Dengan Kompetensi Serta Keterampilan Yang Tepat Untuk

Menghadapi Revolusi Industri Ke-4, Agar Terus Mampu Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Bangsa. Daya Saing Indonesia Secara Keseluruhan Masih Tergolong Rendah Yaitu Urutan Ke-36 Dari 137 Negara Dimana Kita Berada Di Bawah Thailand Yang Menempati Urutan Ke-32 Dan Singapura Yang Berada Pada Peringkat 3. Diharapkan Indonesia Mampu Menempati Posisi 10 Besar Negara Dengan Ekonomi Terkuat Di Dunia Pada Tahun 2030. Indonesia Menempati Urutan Ke-80 Dari 137 Negara Pada Aspek Kesiapan Teknologi. Posisi Ini Berada Di Bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Dan Bahkan Vietnam. Total Pengangguran Menurut Bps Pada Tahun 2017 Adalah Kurang Lebih 7 Juta Orang Dari 128 Jutaan Penduduk Di Indonesia. Harapannya Pada Tahun 2030 Indonesia

Mampu Menciptakan 10 Juta Lapangan Kerja Baru. Mempersiapkan Pemimpin Indonesia Untuk Menghadapai Revolusi Industri 4.0 Merupakan Urgensi “Making Indonesia 4.0”.

Diperkirakan 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains, teknologi, teknik dan matematika, internet of things, pembelajaran sepanjang hayat yang akan mendominasi pada era RI 4.0. 78,6 % Generasi Milenial berpendapat bahwa teknologi dapat menciptakan

lapangan kerja dibandingkan dengan menghancurkan pekerjaan. Pemimpin Indonesia harus memahami tantangan ‘Dunia Baru’ di era Revolusi 4.0 sehingga dapat meningkatkan peradaban bangsa. Salah satu kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah menggenjot sertifikasi kemampuan selain ijazah dimana Perusahaan besar seperti Google, Apple, dan IBM tidak lagi membutuhkan pelamar dengan gelar sarjana, melainkan mereka yang

memiliki pengalaman mengikuti pelatihan coding atau kelas kejuruan yang terkait langsung dengan industri. Kebijakan lain dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah meningkatkan kapasitas Iptek dan Inovasi Universitas dimana penting untuk memperbanyak riset grup dan sinergitas riset, kolaborasi dengan peneliti dunia untuk tema Industri 4.0 & Society 5.0.

KEGIATAN DESIMINASI KELITBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019



Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) didampingi Ny. Seniasih Giri Prasta selaku Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung dan Perebikel Desa Sibang Kaja selaku Pengurus Karang Lansia Desa Sibang Kaja Ni Nyoman Rai Sudani bersama Penari Lansia pada kegiatan Diseminasi Kelitbangan Badung Sayang Lansia

Pada tahun 2019 ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung juga melaksanakan Kegiatan Diseminasi Kelitbangan Badung Sayang Lansia. Cita-cita besar yang ingin diraih dari pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Badung adalah terwujudnya “Kebahagiaan Masyarakat”. Dalam konteks tersebut, Bapak Bupati Badung melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) telah menetapkan sektor kesehatan sebagai salah satu bidang prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung.

Sebagai wujud nyata dari komitmen memprioritaskan sektor kesehatan, maka berbagai kebijakan yang akseleratif dan inovatif telah dilakukan secara holistik dan integratif. Dengan demikian, kebijakan kesehatan bersifat menyeluruh agar masyarakat Kabupaten Badung sehat jasmani-rohani, sehat mental-spiritual. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada warga masyarakat yang mampu hidup sehat dan mencapai lanjut usia, diberikan santunan sebesar Rp 1 juta rupiah per orang per bulan hingga akhir hayatnya. Kebijakan ini mekanismenya telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Bantuan Perlindungan Sosial Lanjut Usia.

Selanjutnya untuk penanganan warga lanjut usia di masa depan, dipandang perlu adanya terobosan berupa inovasi dalam kerangka mewujudkan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung. Untuk dapat merumuskan pola penanganan kepada warga lanjut usia secara tepat dan komprehensif, yang bermuara pada Badung Sayang Lansia, dengan mewujudkan Badung sebagai second home bagi warga lanjut usia, maka pada pertemuan ini saya mohon berkenan ibu Menteri Kesehatan untuk berbagi informasi/ inovasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap warga lanjut usia.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Badan

Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dari 69,8 tahun pada tahun 2010 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 72,4 pada tahun 2035. Peningkatan jumlah penduduk Lansia yang menunjukkan adanya transisi menuju struktur penduduk tua (ageing population).

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mengusung agenda Program Indonesia Sehat (PIS) yang bertumpu pada 3 (Tiga) pilar yakni Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana arah pembangunan kesehatan nasional ini bergerak ke arah promotif preventif dengan tetap memperhatikan upaya kuratif.

Lansia yang berkualitas adalah yang sehat, mandiri, aktif dan produktif. Untuk mencapai kondisi tersebut perlu dilakukan persiapan sejak dini pada fase-fase kehidupan sebelumnya. Maka untuk itu GERMAS harus dilakukan dengan pendekatan Siklus Kehidupan yang dimulai sejak masa pra hamil, hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita, hingga remaja, usia produktif, pra lansia dan lansia.

Ada beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan kesehatan lansia di Indonesia yaitu jumlah lansia yang makin meningkat, masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dalam pengembangan Puskesmas dan RS yang mempunyai pelayanan kesehatan yang santun lansia, sistem pembiayaan BPJS yang belum mendukung pengembangan pelayanan Geriatri terpadu di Rumah Sakit, masih terbatasnya petugas Puskesmas dan RS yang terlatih pelayanan kesehatan lansia dan Geriatri, belum optimalnya kajian dan penelitian terkait kesehatan lansia, dan pengembangan program PJP bagi lansia makin meningkat kebutuhannya. Saya berharap kepada Pemda dan forum kelitbangan untuk memasyarakatkan Germas dalam upaya meningkatkan

status kesehatan masyarakat khususnya Kesehatan Lansia melalui Inpres No 1 / Tahun 2017, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia, meningkatkan pemberdayaan lansia untuk lebih aktif dan produktif, mengembangkan sistem PJP bagi Lansia, membangun sebuah skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan (sustainable) termasuk pembiayaan PJP bagi seluruh lansia, membangun fasilitas panti lansia serta wahana PJP lainnya untuk semua lapisan masyarakat, dan melakukan penelitian untuk memperkuat landasan dalam pengambilan kebijakan dan advokasi kepada pemangku kebijakan untuk mewujudkan kawasan ramah lansia.

DOKUMENTASI BALITBANG

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2017 - 2019



BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA.S.SOS MEMBUKA FORUM KELITBANGAN KABUPATEN BADUNG DISAKSIKAN
KETUA DPRD KABUPATEN BADUNG DR.DRS.PUTU PARWATA MK.,MM
KEPALA BADAN LITBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI DRS.DODI RIYADMAJJI, MM
WAKIL BUAPTI BADUNG DRS. I KETUT SUIASA, SH, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA, SH
DAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYA SUAMBARA,SH.,MM
MANGUPURA 20 MARET 2017



BUPATI BADUNG NYOMAN GIRI PRASTA SELAKU KETENTUAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG DIDAMPINGI WAKIL BUPATI BADUNG KETUT SUIASA DAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
MEMIMPIN RAPAT KOORDINASI DENGAN MAJELIS PERTIMBANGAN KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 4 JULI 2017

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
BERKUNJUNG KE TEMPAT PEMBELAJARAN BUDIDAYA KEPITING BAKAU NASIONAL
YANG DITERIMA LANGSUNG KETUA KELOMPOK NELAYAN WANA SARI
MANGUPURA, 9 OKTOBER 2017



MENINDAKLANJUTI PENUGASAN BAPAK BUPATI BADUNG
UNTUK MEWUJUDKAN AGRO TECHNO PARK DI KECAMATAN PETANG,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG BERSAMA
KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
DAN DINAS PERTANIAN PANGAN KABUPATEN BADUNG
MELAKUKAN PENINJAUAN POTENSI PRODUKSI KOPI KE KOPERASI MERTA BUANA DESA BELOK SIDAN
MANGUPURA, 13 AGUSTUS 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
MELIHAT TAHAPAN PEMILIHAN BIJI KOPI DI SUBAK SEMANIK DESA PLAGA
MANGUPURA, 13 AGUSTUS 2018



MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA DISAMBUT OLEH
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
SAAT MENJELANG PERESMIAN RSPTN UNIVERSITAS UDAYANA
MANGUPURA 28 SEPTEMBER 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG BERDISKUSI DENGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA, DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK & DIKTI SAAT MENJELANG PERESMIAN RSPTN UNIVERSITAS UDAYANA TERMASUK TENTANG AGROTECHNOPARK KABUPATEN BADUNG. MANGUPURA, 28 SEPTEMBER 2018



PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BUPATI BADUNG DIDAMPINGI KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG DENGAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA DIDAMPINGI WAKIL REKTOR IV YANG DIRANGKAIKAN DENGAN PERESMIAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS UDAYANA MANGUPURA 28 SEPTEMBER 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



PEMAPARAN LAPORAN PENDAHULUAN
KAJIAN AGRO TECHNO PARK DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG
DARI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA, DAN DIHADIRI OLEH
PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT, PARA PERBEKEL DI KECAMATAN PETANG, PARA KELIAN SUBAK ABIAN
DAN TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA 4 OKTOBER 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
SELAKU KETUA POKJA PERUMUS KEBIJAKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN AGRO TECHNO PARK
DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG DI DAMPINGI KEPALA BIDANG SOSIAL, EKONOMI PEMERINTAHAN
BALITBANG KABUPATEN BADUNG MEMIMPIN PEMBAHASAN LAPORAN
PENDAHULUAN KAJIAN AGRO TECHNO PARK DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA 4 OKTOBER 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



TAHAP PRESENTASI FESTIVAL INOVASI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
DIBUKA OLEH KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG DIDAMPINGI
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI BALITBANG KABUPATEN BADUNG
DI KANTOR BALITBANG KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA 10 OKTOBER 2018



HARI KEDUA TAHAP PRESENTASI FESTIVAL INOVASI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI BALITBANG KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA 11 OKTOBER 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



LAPORAN SELEKSI AKHIR KEGIATAN PENGEMBANGAN IPTEK KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
YANG DIPIMPIN KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI
DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
DAN DIHADIRI DARI TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI
MANGUPURA, 1 NOPEMBER 2018



SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DALAM RANGKA MENGEVALUASI TINDAK LANJUT HASIL KELITBANGAN TAHUN 2017
DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG SELAKU WAKIL KETUA MAJELIS
MANGUPURA, 8 NOPEMBER 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



PEMBAHASAN LAPORAN ANTARA KEGIATAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG
DIMPIMPIN OLEH KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG BERSAMA
KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 9 NOPEMBER 2018



WAKIL BUPATI BADUNG BERSAMA REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG DAN
KETUA ATP CANGAR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MENYERAHKAN CINDERATA KEPADA WAKIL REKTOR II BIDANG UMUM DAN
KEUANGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA SAAT MENGUNJUNGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG, 12 NOPEMBER 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



BUPATI BADUNG MENYERAHKAN PENGHARGAAN KEPADA JUARA
FESTIVAL INOVASI TAHUN 2018 DENGAN KATEGORI KATEGORI INOVASI TEKNOLOGI
USAI UPACARA BENDERA HUT MANGUPURA KE 9 PADA JUMAT 16 NOVEMBER 2018



BUPATI BADUNG MENYERAHKAN PENGHARGAAN KEPADA JUARA
SILPAKARA NUGRAHA BAGI PENGEMBANG ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 DENGAN HASIL KARYA KOSTUM KARNAVAL DARI LIMBAH LONTAR
USAI UPACARA BENDERA HUT MANGUPURA KE 9 PADA JUMAT 16 NOVEMBER 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



SAMBUTAN BUPATI BADUNG PADA PEMBUKAAN FORUM KELITBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
MANGUPURA, 21 FEBRUARI 2019



FORUM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SECARA RESMI DIBUKA OLEH
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA H. MOHAMAD NASIR, PH.D., AK.RISTEK
MANGUPURA, 21 FEBRUARI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PROF. DR. dr. NILA FARID MOELOEK, SPM (K)
MENJADI NARA SUMBER DALAM DISEMINASI KELITBANGAN BADUNG SAYANG LANSIA
MANGUPURA, 22 FEBRUARI 2019



LAPORAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
PADA ACARA DISEMINASI KELITBANGAN BADUNG SAYANG LANSIA
MANGUPURA, 22 FEBRUARI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PROF. DR. dr. NILA FARID MOELOEK, SP.M (K)
MENERIMA CENDERAMATA DARI BUPATI BADUNG NYOMAN GIRI PRASTA DIDAMPINGI
KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KABUPATEN BADUNG SENIASIH GIRI PRASTA
DAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
SAAT BERKUNJUNG DAN MENJADI NARASUMBER DALAM ACARA DISEMINASI KELITBANGAN DI PUSPEM BADUNG
MANGUPURA, 22 FEBRUARI 2019



FOKUS GROUP DISCUSSION KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA
YANG DIDAMPINGI OLEH KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 14 MEI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUKARSA
MEMAPARKAN MATERI PERSEPSI TERHADAP KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH SAAT INI DI
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PADA FOCUS GROUP DISCUSSION
KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 14 MEI 2019



FOKUS GROUP DISCUSSION KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG
YANG DIHADIRI TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BESERTA
KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MENGUSULKAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN NOMENKLATUR
MANGUPURA, 14 MEI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG DEWA AYU RAKA DEWI, SE., M.SI
MEMAPARKAN KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
PERLINDUNGAN SOSIAL LANJUT USIA DI KABUPATEN BADUNG PADA FOKUS GROUP DISCUSSION
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANJUT USIA DI
KABUPATEN BADUNG YANG DI PIMPIN WAKIL BUPATI BADUNG
MANGUPURA, 22 MEI 2019



WAKIL BUPATI BADUNG I KETUT SUIASA MEMIMPIN FOCUS GROUP DISCUSSION
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANJUT USIA DI KABUPATEN BADUNG
DIDAMPINGI OLEH KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG.
MANGUPURA, 22 MEI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
MENYERAHKAN BANTUAN HANDPHONE ANDROID DAN GPS KEPADA KELOMPOK
NELAYAN PUTRA BALI DALAM RANGKA UJI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
MENGUNAKAN APLIKASI FISH-GO
KEDONGANAN, 3 JUNI 2019



KELOMPOK NELAYAN KEDONGANAN PADA PERTEMUAN PEMANTAPAN PENGGUNAAN APLIKASI
FISH-GO YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
KEDONGANAN, 3 JUNI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA, S.SOS DIDAMPINGI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA, SH
MEMIMPIN RAPAT EVALUASI DETAIL DAN PEMANTAPAN PENILAIAN KOMPETENSI INOVASI TOP 45
YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
MANGUPURA, 18 JUNI 2019



KEPALA BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG I NYOMAN ADI WIRATMA MENERIMA KUNJUNGAN DARI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI, IR. H. RUDI DJUANSYAH
BESERTA ROMBONGAN
MANGUPURA, 20 JUNI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



FOCUS GRUP DISCUSSION PRODUKTIVITAS ALAT TENUN KAIN ENDEK HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PADA KELOMPOK TENUN IKAT FORTUNA SARI DI DESA GETASAN, KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG YANG DIPAPARKAN OLEH ANALIS KEBIJAKAN BALITBANG KABUPATEN BADUNG I GUSTI AYU NGURAH LITA RUMIATI
DIHADIRI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA
KETUA DEKRANASDA KABUPATEN BADUNG NY SENIASIH GIRI PRASTA
DAN KEPALA INKUBATOR BISNIS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA
SAYU KETUT SUTRISNA DEWI, SE.,MM.,AK.,DIPIMPIN OLEH
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
MANGUPURA, 3 JULI 2019



FOCUS GRUP DISCUSSION PRODUKTIVITAS ALAT TENUN KAIN ENDEK HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PADA KELOMPOK TENUN IKAT FORTUNA SARI DI DESA GETASAN, KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG YANG DIPAPARKAN OLEH ANALIS KEBIJAKAN BALITBANG KABUPATEN BADUNG I GUSTI AYU NGURAH LITA RUMIATI
MANGUPURA, 3 JULI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



PERTEMUAN ANTARA KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG DAN
WARMADEWA RESEARCH CENTRE DALAM RANGKA
PEMATANGAN PROPOSAL PENELITIAN WARMADEWA RESEARCH CENTRE
MANGUPURA, 8 JULI 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BADUNG I GEDE WIJAYA,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG PUTU EKA MARTHAWAN
BERBINCANG SEPUTAR SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
MANGUPURA, 8 JULI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
MENYELENGGARAKAN FOCUS GRUP DISCUSSION DENGAN NARASUMBER
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG I PUTU EKA MARTHAWAN,
AKADEMISI UNIVERSITAS UDAYANA DR. IR. NI LUH KARTINI,
PERBEKEL DESA PECATU I MADE KARYANA YADNYA,
ANALIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN PEMBICARA UTAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA
MANGUPURA, 9 JULI 2019



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
MENYELENGGARAKAN FOCUS GRUP DISCUSSION KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS TPST 3 R DALAM
MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG YANG DIPAPARKAN OLEH
ANALIS KEBIJAKAN BALITBANG KABUPATEN BADUNG IR. ANAK AGUNG ISTRI AGUNG WIDYAWATI
MANGUPURA, 9 JULI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



PRESENTASI DAN WAWANCARA DALAM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK APLIKASI FISHGO YANG DIKUTI LANGSUNG WAKIL BUPATI BADUNG I KETUT SUIASA DI DAMPINGI KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA BERSERTA FOUNDER APLIKASI FISH-GO I GEDE MERTA YOGA PRATAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 16 JULI 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA BERSAMA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG PUTU EKA MERTHAWAN DAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH I WAYAN WIJANA SEUSAI PRESENTASI DAN WAWANCARA DALAM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 16 JULI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MEMIMPIN RAPAT PEMBAHASAN DAN MERUMUSKAN FORMULA PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN KELUARGA KURANG MAMPU BERSAMA MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DAN TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 26 JULI 2019



PEMBAHASAN PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN KELUARGA KURANG MAMPU DIHADIRI OLEH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BADUNG, PERANGKAT DAERAH TERKAIT, MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DAN TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 26 JULI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



WAKIL BUPATI BADUNG I KETUT SUIASA DIDAMPINGI KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MELAKUKAN PRESENTASI DI HADAPAN TIM JURI INDEPENDEN DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERHASIL LOLOS EVALUASI TAHAP I DAN MASUK DALAM 7 BESAR NOMINATOR KOMPETISI INDEKS DAYA SAING DAERAH JAKARTA, 30 JULI 2019



WAKIL BUPATI BADUNG FOTO BERSAMA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA BERSERTA JAJARAN SEUSAI PRESENTASI DI HADAPAN TIM JURI INDEPENDEN DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERHASIL LOLOS EVALUASI TAHAP I DAN MASUK DALAM 7 BESAR NOMINATOR KOMPETISI INDEKS DAYA SAING DAERAH JAKARTA, 30 JULI 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MEMIMPIN
RAPAT PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
MANGUPURA, 1 AGUSTUS 2019



RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR INDEKS PEMBANGUNAN GENDER YANG DIHADIRI OLEH
TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BERSAMA TIM PENELITI DARI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT
MANGUPURA, 1 AGUSTUS 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



WAKIL BUPATI BADUNG I KETUT SUIASA DI DAMPINGI SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA DAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MEMIMPIN SIDANG MAJELIS KELITBANGAN UNTUK MENYIKAPI GINI RATIO KABUPATEN BADUNG MANGUPURA, 7 AGUSTUS 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA PADA SIDANG MAJELIS KELITBANGAN BERSAMA MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG, TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT MENYIKAPI NAIKNYA GINI RATIO KABUPATEN BADUNG MANGUPURA, 7 AGUSTUS 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
MEWAKILI BUPATI BADUNG MENGHADIRI KULIAH UMUM
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
PROF. H. MOHAMAD NASIR, PH.D., AK. DALAM RANGKA KEGIATAN HARI KEBANGKITAN
TEKNOLOGI NASIONAL 2019 DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA, 20 AGUSTUS 2019



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
PROF. H. MOHAMAD NASIR, PH.D., AK.
MELALUI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
MENYANGGUPI BANTUAN BIBIT KOPI UNTUK MEMBANGUN AGRO TECHNO PARK KABUPATEN BADUNG
DALAM RANGKA KEGIATAN HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL 2019
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA, 20 AGUSTUS 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA, SH., MH.
MENGHADIRI PEMBUKAAN PEKAN ILMIAH MAHASISWA PERGURUAN TINGGI se INDONESIA OLEH
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Prof. H. MOHAMAD NASIR, Ph.D., AK
MANGUPURA. 27 AGUSTUS 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
DIDAMPINGI PARA ANALIS KEBIJAKAN BALITBANG KABUPATEN BADUNG MENGHADIRI
FOCUS GRUP DISCUSSION TUMBUHAN PAKAN LOKAL UNGGUL DI PROVINSI BALI
YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TUMBUH PAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR, 19 SEPTEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN AGRO TECHNO PARK BERSAMA ANGGOTA TIM MENINJAU LOKASI ATP DI DESA BELOK SIDAN, PETANG SEKALIGUS MEMBERI ARAHAN KEPADA TIM PENYUSUN MASTER PLAN
PETANG, 10 SEPTEMBER 2019



PENANDATANGANAN AKTE NOTARIS SEWA TANAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN PEMILIK LAHAN DISAKSIKAN KEPALA BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG SELAKU SEKRETARIS TIM AGRO TECHNO PARK NYOMAN ADI WIRATMA
PETANG, 13 SEPTEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MENJADI NARASUMBER DALAM DIALOG INTERAKTIF OUTLOOK PELUANG INVESTASI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 YANG DISELENGGARAKAN MENYONGSONG PERINGATAN 1 TAHUN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG DENGAN JUDUL MATERI "POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BADUNG" MANGUPURA, 16 SEPTEMBER 2019



WAKIL BUPATI BADUNG I KETUT SUIASA DIDAMPINGI KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA DAN PLT KADIS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG KETUT SUDARSANA PADA RAPAT TIM PEMBANGUNAN AGRO TECHNO PARK DI PETANG MANGUPURA, 17 SEPTEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
MENERIMA KUNJUNGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK PROVINSI BALI
MANGUPURA, 18 SEPTEMBER 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG MELAKUKAN
FOTO BERSAMA DENGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK PROVINSI BALI
MANGUPURA, 18 SEPTEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
DIDAMPINGI PARA ANALIS KEBIJAKAN BALITBANG KABUPATEN BADUNG PADA
SEMINAR NASIONAL SEPPARTAN II TAHUN 2019 "DENGAN TEMA
"PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN KERUANGAN" YANG DI SELENGGARAKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR, 19 SEPTEMBER 2019



KASUBBID PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PRASARANA WILAYAH PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I NYOMAN MANUABA
MEMIMPIN SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI FISHGO KEPADA
KELOMPOK NELAYAN TRADISIONAL BARUNA I, DI BALAI KELOMPOK NELAYAN BARUNA I,
BR.SESEH, DESA CEMAGI, MENGWI
MENGWI 20 SEPTEMBER 2019,

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
SAAT MENJADI NARASUMBER FOCUS GRUP DISCUSSION
DEVELOPING DIGITAL STARTUP BALI TOWARDS GLOBAL COMPETITIVENESS ITB STIKOM BALI
DENPASAR, 24 SEPTEMBER 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
MENERIMA KENANG-KENANGAN DARI REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI DADANG HERMAWAN USAI FOCUS GRUP DISCUSSION
DEVELOPING DIGITAL STARTUP BALI TOWARDS GLOBAL COMPETITIVENESS ITB STIKOM BALI
DENPASAR, 24 SEPTEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



UNIVERSITAS UDAYANA MENGANUGERAHKAN PENGHARGAAN TERTINGGI UNIVERSITAS UDAYANA KEPADA BAPAK NYOMAN GIRI PRASTA ATAS KOMITMENNYA YANG TINGGI DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN DAN UNIVERSITAS UDAYANA, SERTA DUKUNGAN KEBIJAKANNYA TELAH BERHASIL MENGANTAR RS UNUD MERAJAH AKREDITAS PARIPURNA. PENERIMAANNYA DIWAKILI OLEH I WAYAN SUAMBARA,SH., MM MANGUPURA, 29 SEPTEMBER 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA BESERTA TIM PEMBINA GERTAK MELAKUKAN PENIMBANG HASIL GERTAK (GERAKAN SERENTAK) BADUNG BERSIH DI SEKITAR AREA CENTRAL PARKIR KUTA MANGUPURA, 4 OKTOBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA
MENJADI NARASUMBER DALAM ACARA PERAN INKUBATOR BISNIS UNTUK MEWUJUDKAN NANGUN SAT KERTHI
LOKA BALI DI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
DENPASAR, 8 OKTOBER 2019



PRESENTASI LAPORAN AKHIR HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019.
PRESENTASI DIHADIRIN OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG WAYAN ADI ARNAWA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG, PARA ASISTEN,
KEPALA PD, PERBEKEL DAN LURAH SE BADUNG
MANGUPURA, 7 OKTOBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG DITETAPKAN SEBAGAI PERINGKAT PERTAMA DALAM KATEGORI BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DENGAN KUALIFIKASI "SANGAT INFORMATIF" BERDASARKAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BADAN PUBLIK TAHUN 2019 YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI.
DENPASAR, 10 OKTOBER 2019



WAKIL BUPATI BADUNG FOTO BERSAMA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG BESERTA KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI. SETELAH MENERIMA PENGHARGAAN KATEGORI BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DARI KOMISI INFORMASI PUBLIK PROVINSI BALI
DENPASAR, 10 OKTOBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA MENYERAHKAN 2 PENGHARGAAN SEKALIGUS KEPADA BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA ATAS PRESTASINYA DALAM KOMPETISI SEBAGAI TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK, YAKNI FISHGO (PENENTUAN AREA PENANGKAPAN IKAN) YANG DIAJUKAN OLEH BALITBANG BADUNG DAN BATIK (BADUNG ANTI KANTONG PLASTIK) YANG DIAJUKAN OLEH DLHK BADUNG. KEDUA INOVASI TERSEBUT SAAT INI JUGA DIAJUKAN OLEH KEMENPAN RB DALAM PENILAIAN UNPSA TINGKAT INTERNASIONAL
JAKARTA. 15 OKTOBER 2019



BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA FOTO BERSAMA DENGAN KEPALA BALITBANG BADUNG WAYAN SUAMBARA, KEPALA DLHK BADUNG PUTU EKA MERTAWAN, KEPALA BAGIAN ORGANISASI WAYAN WIJANA DAN KEPALA BAGIAN HUMAS GDE SUDARWITA SETELAH MENERIMA PENGHARGAAN TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK
JAKARTA. 15 OKTOBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA SEBAGAI NARASUMBER DALAM SEMINAR NASIONAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH FAKULTAS ILMU HUKUM DAN SOSIAL UNDIKNAS DENPASAR, 18 OKTOBER 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MENERIMA CENDERAMATA SEBAGAI NARASUMBER DALAM SEMINAR NASIONAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH FAKULTAS ILMU HUKUM DAN SOSIAL UNDIKNAS DIBERIKAN OLEH WAKIL REKTOR I UNDIKNAS Dr. NI WAYAN WIDHIASTHINI, S.Sos., M.Si. DENPASAR, 18 OKTOBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENGUATAN INOVASI DAERAH YANG DIDAMPINGI KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MEMIMPIN RAPAT TIM DI BALITBANG KABUPATEN BADUNG DENGAN AGENDA UTAMA MEMBAHAS PENGEMBANGAN APLIKASI FISHGO YANG TELAH BERHASIL LOLOS TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN KINI AKAN MAJU DALAM KOMPETISI UNITED NATIONS PUBLIC SERVICE AWARD 2020 DI PBB MANGUPURA, 17 OKTOBER 2019



RAPAT PEMBAHASAN PENGEMBANGAN APLIKASI FISHGO YANG TELAH BERHASIL LOLOS TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN KINI AKAN MAJU DALAM KOMPETISI UNITED NATIONS PUBLIC SERVICE AWARD 2020 DI PBB YANG PELAKSANAANNYA AKAN BEKERJASAMA DENGAN INKUBATOR BISNIS STIKOM BALI MANGUPURA, 17 OKTOBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG I WAYAN ADI ARNAWA SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENGUATAN INOVASI DAERAH MEMIMPIN RAPAT TIM DI BALITBANG KABUPATEN BADUNG DENGAN AGENDA UTAMA MEMBAHAS PENGEMBANGAN APLIKASI FISHGO YANG TELAH BERHASIL LOLOS TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN KINI AKAN MAJU DALAM KOMPETISI UNITED NATIONS PUBLIC SERVICE AWARD 2020 DI PBB
MANGUPURA, 17 OKTOBER 2019



SETELAH LOLOS SEBAGAI TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK, DAN MASUK DALAM NOMINASI KOMPETISI TINGKAT INTERNASIONAL UNPSA (UNITED NATION PUBLIC SERVICE AWARDS) TAHUN 2020 MEWAKILI INDONESIA, KINI FISHGO DAN BATIK MENDAPAT FASILITATOR DAN PENDAMPINGAN DARI KEMENPAN RB UNTUK MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM AJANG UNPSA
DENPASAR, 18 OKTOBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA,SH., MH.
MENGHADIRI WISUDA KE-25 ITB STIKOM BALI
MANGUPURA. 26 OKTOBER 2019



DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN KABUPATEN BADUNG, PEMENUHAN HAK ASN
TERHADAP KESEMPATAN BIMTEK, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
MENGINISIASI PELAKSANAAN BIMTEK ONLINE BAGI ASN. RENCANA TERSEBUT DIPAPARKAN
OLEH KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG WAYAN SUAMBARA BERSAMA
TIM KELITBANGAN DR. LINAWATI DIHADAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG WAYAN ADI ARNAWA
MANGUPURA, 31 OKTOBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MEMAPARKAN RENCANA MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN KABUPATEN BADUNG, PEMENUHAN HAK ASN TERHADAP KESEMPATAN BIMTEK, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG MENGINISIASI PELAKSANAAN BIMTEK ONLINE BAGI ASN. DI PANDU OLEH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BADUNG COKORDA RAKA DARMAWAN SH.,MSI MANGUPURA, 31 OKTOBER 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I WAYAN SUAMBARA MEMBERIKAN ARAHAN SEBELUM MEMULAI KEGIATAN GERTAK (GERAKAN SERENTAK) BADUNG BERSIH DI SEKITAR SETRA KAUH KUTA MANGUPURA, 1 NOPEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG NYOMAN ADI WIRATMA MEMIMPIN RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN SURVEY PENYUSUNAN INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2019 SURVEY DILAKSANAKAN OLEH INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG MANGUPURA, 6 NOPEMBER 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABAUPATEN BADUNG MENGHADIRI FORUM BAPPEDA LITBANG Se BALI YANG DILAKSANAKAN DARI TGL 7- 9 NOPEMBER 2019 DI NUSA LEMBONGAN NUSA LEMBONGAN, 7 NOPEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
FOTO BERSAMA DENGAN NARASUMBER KEPALA PUSAT INOVASI BALITBANG KEMENDAGRI DAN
FUNGSIONAL DARI DITJEN BANGDA KEMENDAGRI SEUSAI RAPAT FORUM BAPPEDA LITBANG Se BALI
NUSA LEMBONGAN, 7 NOPEMBER 2019



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG BESERTA STAF,
MATUR PIUNING DI PURA PUCAK MANGU PERSIAPAN MENDAK TIRTA KE
PURA ULUN DANU BATUR DALAM RANGKA KARYA DI PURA PUCAK MANGU
MANGUPURA, 12 NOPEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG FOTO BERSAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI DAN STAF PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG SEUSAI MENDAK TIRTA IDE BETARI SAKING
PURA ULUN DANU BATUR DALAM RANGKA KARYA MEPADUDUSAN AGUNG, MAPESLANG,
MEDASAR TAWUR BALIK SUMPAH UTAMA DI PURA SAD KAHYANGAN PENATARAN AGUNG PUCAK MANGU
MANGUPURA, 12 NOPEMBER 2019



PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR KAJIAN DAN PEMETAAN POTENSI EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BADUNG DIPIMPIN
KEPALA BIDANG SOSIAL EKONOMI DAN PEMERINTAHAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG BESERTA
PROF. DR. IDA BAGUS RAKA SUARDANA, SE., MM. SELAKU TIM KELITBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 15 NOPEMBER 2018

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



WAKIL BUPATI BADUNG KETUT SUIASA MENYERAHKAN PENGHARGAAN SILPAKARA NUGRAHA TAHUN 2019 KEPADA 3 INOVATOR PERORANGAN YANG DIDAMPINGI OLEH KETUA DPRD KABUPATEN BADUNG Dr. PUTU PARWATA, SE.MM, SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG WAYAN ADI ARNAWA, KEPALA BALITBANG WAYAN SUAMBARA
MANGUPURA, 16 NOPEMBER 2019



WAKIL BUPATI BADUNG KETUT SUIASA DIDAMPING OLEH KETUA DPRD KABUPATEN BADUNG Dr. PUTU PARWATA, SE.MM, SEKDA BADUNG WAYAN ADI ARNAWA, KEPALA BALITBANG WAYAN SUAMBARA MENYERAHKAN PENGHARGAAN SILPAKARA NUGRAHA TAHUN 2019 KEPADA 3 INOVATOR PERORANGAN
MANGUPURA, 16 NOPEMBER 2019

DOKUMENTASI BALITBANG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I KOMANG SUANTARA
MENERIMA KUNJUNGAN DARI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YANG DIPIMPIN OLEH GUNAWAN WIBISANA, STAF KHUSUS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
KUNJUNGAN DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA LITBANG DAERAH
MANGUPURA, 21 NOVEMBER 2019



KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG I KOMANG SUANTARA FOTO BERSAMA DENGAN
GUNAWAN WIBISANA, STAF KHUSUS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
MANGUPURA, 21 NOVEMBER 2019

KALEIDOSKOP

3 TAHUN KEGIATAN

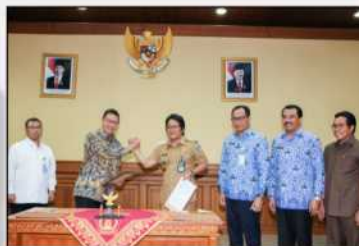
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2017-2019**



Sidang Majelis Pertimbangan yang di pimpin oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta selaku Ketua Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemkab Badung beserta Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, Balitbang Kabupaten Badung merupakan " Jantung Pembangunan Kabupaten Badung "



Bupati Badung Membuka Forum Kelitbang Kabupaten Badung Tahun 2018 yang dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin



Bupati Badung Membuka Forum Kelitbang Kabupaten Badung Tahun 2018 yang dihadiri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Prof. H. Mohamad Nasir, Drs., Ak., M.Si., Ph.D,



2017

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta Membuka Forum Kelitbang Kabupaten Badung Tahun 2017 dihadiri oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji



2018

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Meraih Peringkat ke 3 Mangupura Award Kabupaten Badung Tahun 2018 diserahkan langsung Bupati Badung kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung



2019

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) menjadi nara sumber dalam Diseminasi Kelitbangan BADUNG SAYANG LANSIA diterima langsung Bupati Badung yang didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

